

Tokoh Indonesia®

THE EXCELLENT BIOGRAPHY

DotCom

Volume 17 Rp. 14.000

Luar Jabotabek Rp. 15.000

**Profil
Menteri
Kabinet
Indonesia
Bersatu**



SBY-JK
PRESIDEN WAPRES
PILIHAN RAKYAT

kreasi etalase web

www.esero.com

DESIGN WEB DESIGN



Esero

Web Design & Hosting



TOKOH UTAMA:

SUSILO BAMBANG YUDHOYONO: Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang akrab disapa SBY, ini dijuluki 'Jenderal yang Berpikir' dan 'Mutiara di Atas Lumpur'. Sebab pada awal reformasi, saat ABRI dihujat, jenderal berpenampilan tenang, berwibawa serta bertutur kata bermakna dan sistematis, ini laksana mutiara yang selalu bercahaya. Lalu, dia pun menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan. Itu menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu Presiden putaran dua 20 September 2004 7

TOKOH UTAMA: Jusuf Kalla, Prioritas Pemulihan Ekonomi: Hidup sahaja, menjauhi kemewahan. Inilah prinsip yang ditanamkan Muhammad Jusuf Kalla kepada dirinya sendiri, keluarga, saudara-saudara serta orang-orang di sekelilingnya. Jusuf tak akan pernah mengubah sikapnya meskipun tengah menduduki kursi wakil presiden..... 13
 Lima Tahun Jangan Diukur 100 Hari. 9
 Susilo-Kalla, Perpaduan yang Serasi. 11

SURAT: Tokoh Partai, Suri teladan, Visi Panji Gumilang, Referensi Wartawan, Rencana Seminar, Tokoh Sumut, Data Kabinet, dan Makin Bagus. 4

TOKOH PILIHAN: Profil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu:



Widodo AS -
 Aburizal Bakrie -
 Prof Dr Alwi Shihab -
 Yusril Ihza
 Mahendra - Letjen
 TNI (Purn) M.
 Ma'aruf - Hassan
 Wirayuda - Prof. Dr.
 Juwono Sudarsono

- Dr. Hamid Awaludin - Jusuf Anwar - Purnomo Yusgiantoro -
 Andung Nitimihardja - Mari E Pangestu - Anton Apriantono -
 M.S. Kaban - Ir Hatta Radjasa - Freddy Numberi - Fahmi
 Idris - Djoko Kirmanto - Siti Fadilah Supari - Prof Dr Bambang
 Sudibyo - Bachtiar Chamsyah - M. Maftuh Basyuni - Jero
 Wacik - Dr. Kusmayanto Kadiman - Suryadharma Ali - Dr.
 Sofyan A. Djalil - Ir. Rachmat Witoelar - Meutia Hatta - Taufiq
 Effendi - Dr. Sri Mulyani Indrawati – Sugiharto - Adyaksa
 Dault - Saifullah Yusuf - M Yusuf Ashari - Abdul Rahman
 Saleh - Sudi Silalahi 18

COVER: Esero Design. **FOTO:** dok-ist

BERITA TOKOH: Dr. Laurence A. Manullang: Kinerja 40 Hari KIB (Kabinet Indonesia Bersatu). Top eksekutif keuangan dunia ini menyoroti kinerja 30 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Dia belum melihat para menteri menjabarkan arahan Presiden yang bersifat kualitatif menjadi sasaran objektif yang kuantitatif di departemen masing-masing. 6

KAPUR SIRIH: Pemimpin Perubahan. 4

DEPTHNEWS: Peluang dan Tantangan SBY: SBY-kah yang ditunggu-tunggu sebagai sang Satria Piningit untuk memulihkan kondisi republik yang sedang sakit? Kepemimpinan SBY masih perlu diuji, apakah dia mampu atau tidak, mengatasi masalah yang menggungung. 16



■ **MAJALAH TOKOH INDONESIA, THE EXCELLENT BIOGRAPHY** ■ **EDISI CETAK: TOKOHINDONESIA DOTCOM** - ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA ■ **PEMIMPIN UMUM/PEMIMPIN REDAKSI:** Ch. Robin Simanullang ■ **REDAKTUR EKSEKUTIF/WEBMASTER:** Atur Lorieclide Paniroy ■ **REDAKTUR:** Haposan Tampubolon, Tian Son Lang ■ **SENIOR WRITER:** H. Syahbuddin Hamzah ■ **SEKRETARIS REDAKSI:** Marjuka Situmorang ■ **STAF REDAKSI:** Christian Natamado, Heru B Utomo ■ **BIRO JABAR:** Sumarsono (Kepala), Imam Siswanto ■ **LAWYER:** Mifa P Singarimbun, SH ■ **KONTRIBUTOR:** Dandy Hendrias, Yoeliani Desianna Somali, Yusak HS, Anis Fuadi, Yayat Suryatna ■ **TATA GRAFIS:** ESERO Design ■ **DIVISI USAHA:** Adur Nursinta (Kepala) ■ **IKLAN:** Doan Adikara Pudan ■ **SIRKULASI & DISTRIBUSI:** Kedarton Harianja, Willy Sumantri (Jawa Barat) ■ **ALAMAT REDAKSI:** Jalan Bukit Duri Tanjakan IX No.26, Tebet, Jakarta Selatan 12830 ■ **Po Box 4042 JKTJ** 13040 ■ **TELEPON** (021) 83701736 - 9101871 ■ **FAX:** (021) 9101871 ■ **SMS** 0812-949-1043 dan 0813-107-8888-2 ■ **E-MAIL:** redaksi@tokohindonesia.com - iklan@tokohindonesia.com - sirkulasi@tokohindonesia.com ■ **ALAMAT BIRO JAWA BARAT:** Jalan Musaen No.3 Pasirkaliki, Bandung, Telepon-Fax 022-4240689, E-mail: jabar@tokohindonesia.com ■ **SITUS WEB:** www.tokohindonesia.com - www.tokohnasional.com - www.ensiklopedi.com - www.tokoh.net - www.e-ti.com - www.indonesianfamous.com ■ **HARGA:** Rp. 14.000 (Luar Jabotabek Rp.15.000) ■ **Langganan** Rp.160.000 (12 Edisi) ■ **TARIF IKLAN:** Cover Rp.20.000.000, Isi Rp. 12.500.000 ■ **PENERBIT:** pt. Citraprinsip Publisitas Indoaprint ■ **REKENING:** Bank Niaga Supomo Jakarta No.025.01.24000.00.8 ■ **SERTIFIKAT MEREK:** Ditjen HAKI Departemen Hukum dan HAM Agno: D00-02-2395

SURAT

Tokoh Partai

Tokoh partai dan anggota dewan yang *track record*-nya bagus, dan jujur dalam parlemen (tidak korup) hendaknya ditampilkan dalam Ensiklopedi Tokoh Indonesia. Hal ini dapat menjadi contoh pejabat dan capej yang akan datang.

Dedi Irawan
astro_didi@yahoo.com

Suri Teladan

Memaparkan biografi para tokoh merupakan hal yang penting untuk dijadikan suri teladan dalam mencapai cita-cita masa depan. Olehnya saya sangat simpatik dengan web site Tokoh Indonesia ini.

Dr. Taruna Ikrar
ikrar@hotmail.com

Visi Panji Gumilang

Setelah saya membaca majalah TI yang membahas tuntas tentang siapa itu Panji Gumilang, saya semakin respek kepada beliau dengan visi dan misinya sebagai seorang pendidik. Semoga Allah terus memberikan kesehatan dan kekuatan kepadanya. Amin.

Iwan Wahyudi
karang_congok@yahoo.com

Referensi Wartawan

Saya sangat senang dengan tampilan informasi di website Tokoh Indonesia. Selaku wartawan, saya banyak mendapat bahan referensi dalam menulis untuk surat kabar tempat kami bekerja di Makassar yakni Harian Pedoman Rakyat. Semoga jaya dan sukses selalu.

Moh Yahya Mustafa
yayamks@yahoo.com

Rencana Seminar

Saya berencana mengadakan seminar bisnis tetapi kesulitan dalam menemukan alamat para pembicara, dan saya kira media inilah yang tepat untuk membantu saya. Bagaimana saya mendapatkan alamat dan telp para pengusaha terkenal seperti Setiawan Djodi, Tanri Abeng, Bob Sadino, dan Jaya Suprana.

Aatya Dana
ceklekan@yahoo.com

Tokoh Sumut

Banyak para tokoh yang belum dimuat dalam TI, jadi saya ada masukan agar redaksi mau untuk mencari tokoh-tokoh yang ada di Sumatera Utara, khususnya di beberapa kota. Di mana para tokoh-tokoh ini selalu berjuang dan hidup bersama dengan rakyat.

Heriansyah
satu_dem@yahoo.com

Pemimpin Perubahan

Usai sudah proses panjang Pemilu Presiden. Bangsa ini, untuk pertama kalinya, telah memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan, yang terpilih adalah pemimpin yang berjanji membawa perubahan positif bagi rakyat, bangsa dan negara. Dia adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Penampilan yang populis, percaya diri, keinginan kuat dan keberanian menjanjikan perubahan merupakan modal utama dwitunggal ini dalam meraih simpati rakyat, yang mengantarkan mereka menggapai pucuk pimpinan tertinggi negara ini.

Dengan modal keberanian menjanjikan perubahan, ditunjang dengan pengetahuan dan pengalaman akademis, politik, bisnis, dan pemerintahan (keduanya sebagai Menteri Koordinator Polkam dan Kesra dalam Kabinet Gotong Royong), mereka telah berhasil meyakinkan rakyat bahwa duet ini akan mampu menjadi pemimpin tertinggi di negeri ini menuju keadaan yang lebih aman, adil, dan sejahtera.

Rakyat percaya, karena keduanya menampilkan sosok yang berkeinginan kuat untuk sukses. Apalagi Presiden dan Wakil Presiden yang berorientasi pada perubahan ini ditopang oleh para menteri (Kabinet Indonesia Bersatu) yang berjanji dan menandatangani 'kontrak politik' menjalankan tugasnya dengan setia, bekerja keras, dan tidak korupsi sebagai bagian dari kepemimpinan yang berorientasi pada perubahan.

Dengan komitmen, sebagai pemimpin perubahan, diyakini bahwa para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang dilantik 21 Oktober 2004, sehari setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, akan berusaha untuk menunjukkan prestasi dua kali lebih besar. Mereka akan mempersembahkan solusi-solusi luar biasa untuk membawa perubahan signifikan demi kemajuan bangsa ini, sebagaimana dijanjikan.

Kita percaya, para pemimpin perubahan ini akan berjuang untuk membawa perubahan besar, dalam berbagai bidang kehidupan bangsa, sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa beradab lainnya di dunia. Langkah perubahan yang mereka lakukan akan membuat masyarakat ikut termotivasi untuk bersama-sama menciptakan perubahan di lingkungan masing-masing. Pemimpin dan masyarakat akan bersama-sama mencari alternatif dan ide-ide inovatif demi kesejahteraan bangsa Indonesia.

Namun jika mereka biasa-biasa saja, kemungkinan akan mendapat tekanan sosial yang cukup berarti. Tapi, bagi seorang pemimpin yang berorientasi perubahan, tekanan sosial, budaya, dan ekonomi akan lebih mendorong menunjukkan prestasi lebih baik.

Hal-hal itulah yang mendorong kami untuk menyajikan profil ringkas Presiden, Wapres, dan para menteri KIB pada edisi ini. Profil mereka lebih lengkap tersaji di website TokohIndonesia DotCom. Sehingga publik bisa lebih mengenal latar belakang kehidupan dan kompetensi mereka dalam jabatan masing-masing.

Desember 2004

Redaksi

Data Kabinet

Tolong dilengkapi data-datanya seperti kabinet, dan seterusnya supaya bisa didapat informasi yang baik dan lengkap. Jangan malas melengkapinya. Jangan kerja sehari diselesaikan setahun baru selesai. Negara kita miskin karena pola kerja begini.

Nono
nontjer@yahoo.com

Makin Bagus

Tokoh Indonesia bagus baik web dan majalahnya. Saya bangga makin hari makin meningkat. Makin banyak dijaring figur yang menonjol bukan karena jabatannya dan makin baik untuk dijadikan sebagai contoh khususnya bagi kaum muda.

Aan Fardian
aan_fardian@yahoo.com



Melayani Anda
ke **TIMUR TENGAH**
dalam perjalanan
bernuansa **ISLAMI**

Mulai Agustus 2004, Mawaddah Garuda Indonesia siap mengantar Anda ke tujuan Timur Tengah. Layanan penuh nuansa Islami terus dihadirkan sejak sebelum keberangkatan hingga tiba di tujuan untuk menemani Anda yang akan beribadah (Umroh/Haji Plus), berbisnis ataupun tujuan lainnya. Gunakan Garuda Indonesia dalam setiap perjalanan Anda dan nikmati layanan yang menyejukkan hati. Untuk informasi dan reservasi hubungi Call Center 24 Jam Garuda Indonesia atau agen perjalanan Anda.



Garuda Indonesia

Bangga Bersamanya

Dr. Laurence A. Manullang

Kinerja 40 Hari KIB

Top eksekutif keuangan dunia Dr Laurence Manullang menyoroti kinerja 30 hari Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Dia belum melihat para menteri menjabarkan arahan Presiden yang bersifat kualitatif menjadi sasaran objektif yang kuantitatif di departemen masing-masing.

Direktur Institut Manajemen Indonesia, itu mencontohkan defisit anggaran sebesar Rp 26,271 triliun harus dijelaskan ditutup dengan apa. "Kalau dengan mengurangi subsidi BBM, berapa, atau dengan optimalisasi anggaran, berapa, atau pergeseran pemakaian minyak pada migas, berapa," kata Manullang, yang juga Ketua STIE IBEK, Jakarta.

Manullang mengatakan, produksi minyak Indonesia yang hanya 1,02 juta barrel per hari tidak dijelaskan apa penyebabnya menurun. Ia menengarai salah satu penyebab adalah UU Migas yang mengharuskan investor membayar pajak, padahal belum menemukan minyak, telah menyebabkan investor tidak ada yang berminat datang ke Indonesia. Padahal, kebutuhan minyak domestik 1,350 juta barrel per hari. Berarti lebih dari 350.000 barrel per hari minyak diimpor menguras devisa.

"Apakah dengan menaikkan harga minyak persoalan selesai, sedang 45 persen masyarakat menghendaki BBM jangan dinaikkan. Menteri terkait harus mendesain *action plan* sekarang dan sasaran yang akan dicapai dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya," kata Manullang.

Demikian pula dengan penerimaan pajak yang Rp 403,8 triliun, dipertanyakannya apakah tidak mungkin defisit anggaran dapat ditutupi semua dengan menertibkan perpajakan. Sebab, menurut Manullang, selama ini masyarakat dan pengusaha memperkirakan 30 persen pajak bocor ke tangan-tangan individu dengan pelaporan fiktif. Sedangkan penerimaan non-pajak yang sebesar Rp 279,2 triliun masih dapat ditingkatkan melalui penertiban penyelundupan. "Coba, lihat *casings handphone* diimpor melalui aparat saja oleh beberapa pengusaha tanpa bea. Bea Cukai, aparat terkait, pengusaha, setiap detik panen," kata Manullang, mencontohkan betapa lemahnya aparat bea cukai menertibkan sumber pendapatan negara.

Sebagai top eksekutif keuangan dunia yang sudah populer namanya di kalangan internasional, Manullang menyebutkan untuk membayar hutang luar negeri Rp 70 triliun tahun ini sangat berat. Ia meminta menteri terkait menjelaskan bagaimana menanggulangnya, sebab nampaknya para kreditor tidak akan menyetujui *rescheduling* karena mereka menganggap sesungguhnya Indonesia mampu membayar. Penyebabnya hanya karena sumber-sumber dana tidak dioptimalkan malah didesain suatu pipa kebocoran.

Terbukti hasil temuan BPK terdapat Rp 166,5 triliun kebocoran, berarti 8,3 persen dari PDB yang berjumlah Rp 1.990,3 triliun. Sedang penggerak ekonomi, seperti investasi PMA, tahun 2003 hanya US\$ 1,7 miliar dibandingkan dengan US\$ 40 miliar di tahun 1995, atau PMDN tahun 2003 hanya Rp 25,3 triliun dibanding tahun 1995 yang Rp 119 triliun.

Manullang juga menyoroti perbankan yang belum bisa berfungsi sebagai *agent of development*. Terbukti dana masyarakat yang terkumpul Rp 909,5 triliun, yang disalurkan menunjang kegiatan ekonomi baru Rp 430,18 triliun atau 47,3 persen. Bank mengakumulasi

pendapatan dari *spread* antara *lending rate-borrowing rate* yang menyolok. "Bank menyalurkan kredit berbunga 19 persen, dan membayar bunga tabungan ke nasabah hanya 6 persen. Bank aman dengan menikmati selisih bunga tidur 13 persen," tegasnya.

Angka kemiskinan absolut menurut Manullang telah mencapai 17,4 juta penduduk. Ditambah dengan tenaga kerja setengah menganggur, yang bekerja kurang dari 40 jam seminggu, membuat angka kemiskinan menjadi 41 juta penduduk atau 50 persen dari tenaga produktif.

Hasil hutan yang dicuri bernilai Rp 83 miliar per hari, atau Rp 30,42 triliun per tahun itu sebenarnya jauh dari cukup menutupi defisit anggaran Rp 26,271 triliun.

Hasil pertanian dan perikanan dalam 100 hari pertama menurut Manullang hendaknya dikalkulasi berapa kenaikan optimalisasi sebagai kontribusinya menutupi defisit anggaran. Misalnya, hasil budidaya ikan untuk setiap 500.000 hektar dapat menyerap tenaga kerja 1 juta orang, dan menopang PDB Rp 1,2 triliun. Demikian pula hasil gabah yang 53 juta ton (ekivalen 32 juta ton beras), harus dipertahankan atau ditingkatkan untuk menghindari pengurasan devisa.

Manullang juga meminta agar menteri segera menyiapkan bagaimana rencana terpadu untuk menanggulangi korupsi di segala sentra biaya (*cost center*), di sentra-sentra pendapatan (*revenue centers*), serta di sentra-sentra investasi (*investment center*)

Terhadap ke-326 BUMN pakar akunting Laurence Manullang meminta menteri harus menjelaskan bagaimana pondasi *business objectives*, dimana setiap *line* dari *Balance Sheet* dan *Income Statement* harus tajam di-*review* dengan memakai bedah pisau *responsibility accounting*. Tidak luput juga, terhadap *capital flight* dan dana parkir hasil korupsi di 14 negara-negara penadah dolar gelap, perlu dipanggil kembali dengan janji amnesti 60 persen bebas dimasukkan ke kas negara, dalam 6 bulan, bila tidak akan dicari dan diuber melalui *intensive investigators*.

"Kalau menteri mengatakan pada saat ini sedang dilakukan pendataan, berarti menteri yang bersangkutan belum mengerti fungsi manajerial, mereka hanya pekerja rutinitas yang handal (*a good lamb*) sedang posisi mereka adalah posisi strategis yang bisa memberdayakan lingkungan jadi peluang dan mengelola ketidakpastian (*to manage uncertainties*)," cetus Manullang.

Manullang menyoroti pula pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sejak awal sudah menegaskan akan memberi sejumlah pos tertentu porsinya menteri kepada kalangan profesional, namun pada detik-detik akhir pengumuman kabinet pos itu harus diserahkan kepada kalangan partai politik yang aturan seharusnya netral. Ini, kata Manullang merupakan indikator integritas yang diragukan.

"Untuk ini, saya hanya mengutip pendapat Peter Drunker, yang berkata, eksekutif bisa dimaafkan kalau menduduki jabatan walaupun memiliki kurang kemampuan tentang pekerjaan yang dipimpinya. Tetapi, tidak bisa dimaafkan orang yang memiliki integritas diragukan, juga yang menunjuk dia pun tidak bisa dimaafkan," kata Laurence. □
eti/ht-ms





PRESIDEN SBY BERSAMA ISTERI DAN KEDUA ANAKNYA ■ e-ti/dok kel

SBY

PRESIDEN PILIHAN RAKYAT DARI DESA TREMAS

Berpasangan dengan Muhammad Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, paduan dwitunggal ini menawarkan program memberikan rasa aman, adil dan sejahtera kepada rakyat. Pasangan ini meraih suara mayoritas rakyat Indonesia (61 persen), mengungguli pasangan Megawati Soekarnoputri - KH Hasyim Muzadi. Penampilannya mulai menonjol sejak menjabat Kepala Staf Teritorial ABRI (1998-1999) dan semakin berkibar saat menjabat Menko Polsoskam (Pemerintahan Presiden KH Abdurrahman Wahid) dan Menko Polkam (Pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri).

Dari Desa Tremas

Lepas azan duhur, 9 September 1949, seorang bayi pria lahir tanpa kehadiran ayahnya, Danramil yang sedang berdinass. Ny. Siti Habibah, melahirkan bayinya di rumah kakeknya di Desa Tremas, 12 kilometer dari kota Pacitan. Kedua orang tuanya memberi nama Susilo Bambang Yudhoyono. Sekarang, Susilo menjabat presiden Indonesia yang keenam. Susilo kecil dibesarkan di lingkungan keluarga yang hidup prihatin. Ayahnya yang berpangkat Pembantu Letnan Satu (Peltu), Komandan Rayon Militer, bergaji kecil. Karena itu Peltu Soekotjo dan Habibah membesarkan anak tunggalnya dalam kondisi ekonomi yang pas-pasan. Apalagi Soekotjo bertugas di daerah kecamatan terpencil dan gersang. Sebagai anak seorang tentara, SBY, demikian panggilan akrabnya sekarang, biasa hidup disiplin dan

Presiden Republik Indonesia pertama hasil pilihan rakyat secara langsung. Lulusan terbaik Akabri (1973) yang akrab disapa SBY, ini dijuluki 'Jenderal yang Berpikir' dan 'Mutiara di Atas Lumpur'. Sebab pada awal reformasi, saat ABRI dihujat, jenderal berpenampilan tenang, berwibawa serta bertutur kata bermakna dan sistematis, ini laksana mutiara yang selalu bercahaya. Lalu, dia pun menyerap aspirasi dan suara hati nurani rakyat yang menginginkan perubahan. Itu menjadi kunci kemenangannya dalam Pemilu (Pemilihan Umum) Presiden putaran dua 20 September 2004.



PRESIDEN SBY BERSAMA IBU NEGARA KRISTIANI HERAWATI ■ e-ti/dok kel

kerja keras. SBY yang berbadan bongsor sudah tampak lebih menonjol dari teman-temannya sejak sekolah rakyat (dasar). Demi kelanjutan sekolahnya, SBY dititipkan kepada Sastro Suyitno, pamannya yang menjadi Lurah Desa Ploso, Pacitan.

Sosok SBY yang tinggi atletis, sangat menonjol dalam klub voli sekolahnya (SMA). Selain senang olahraga, SBY ikut kelompok musik sekolahnya, Band Gaya Teruna. SBY dipercaya memegang bass. Dia juga penyanyi yang senang menyanyikan lagu-lagu sendu. Belakangan SBY punya hobi menulis puisi.

Kepintarannya menyanyi, sering dimanfaatkannya sebagai alat kampanye pemilihan legislatif dan presiden, dimulai dari kelompok musik SMA. Pengalaman getir mendera SBY. Dia menyaksikan rumah tangga orang tuanya yang terbelah. Ayah dan ibunya bercerai ketika SBY masih remaja. Karena itu dia ingin cepat-cepat keluar dari daerahnya yang gersang dan terpencil. Obsesinya jadi taruna Akabri, mengikuti jejak ayahnya sebagai tentara. Namun SBY harus bersabar. Setelah lulus SMA tahun 1968, SBY tidak segera mendaftar ke Akabri. Dia sempat diterima di ITS

BIODATA:

Nama :
Susilo Bambang Yudhoyono
Lahir :
Pacitan, Jawa Timur, 9 September 1949
Agama :
Islam
Jabatan:
Presiden RI (2004-2009)
Istri :
Kristiani Herawati,
Putri ketiga Jenderal (Purn) Sarwo Edhie Wibowo
Anak :
Agus Harimurti Yudhoyono dan Edhie Baskoro Yudhoyono
Ayah:
Letnan Satu (Peltu) R. Soekotjo
Ibu:
Siti Habibah
Pangkat terakhir :
= Jenderal TNI (25 September 2000)
Pendidikan:
= Akademi Angkatan Bersenjata RI (Akabri) tahun 1973
= Sekolah Komando Angkatan Darat, 1988-1989
= Command and General Staff College, Fort Leavenworth, Kansas, AS
Master of Art (MA) dari Management Webster University, Missouri, AS

Surabaya, jurusan teknik mesin. Tetapi dia meninggalkan bangku kuliah semester satu, memilih masuk Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama (PGSLP) di Malang. Tekadnya menjadi taruna Akabri di Magelang kesampaian, setelah lulus ujian masuk di Bandung, tahun 1970. SBY satu angkatan dengan mendiang Agus Wirahadikusumah, Ryamizard Ryacudu, Prabowo Subianto, Yudi M. Yusuf dan Wresniwiro. Saat itu yang menjabat Gubernur Akabri, Mayjen Sarwo Edhie Wibowo, belakangan jadi ayah mertuanya. SBY diledek teman-temannya *jerapah* lantaran sosoknya yang tinggi. Namun dia meraih predikat lulusan terbaik Akabri 1973, menerima lencana Adhi Makasaya dari Presiden Soeharto. Ketika menjadi komandan Divisi Korps Taruna, SBY secara tak sengaja bertemu pandang dengan Kristiani Herawati yang sedang menemui ayahnya, Sarwo Edhie, di Lembah Tidar. Kebetulan SBY juga sedang menemui Sarwo Edhie untuk melaporkan kegiatan Korps Taruna. Mungkin SBY jatuh cinta pada pandangan pertama. Soalnya, dia sering bertandang ke kediaman dinas Sarwo Edhie dengan harapan bisa

berjumpa lagi dengan anak gadisnya. Benih cinta SBY tidak bertepuk sebelah tangan. Kristiani pun jatuh cinta pada pandangan pertama. Ayahnya, Peltu Soekotjo, kaget mendengar putranya menggaet putri seorang jenderal. Dia menganggap putranya salah pilih lantaran jarak status antara dirinya dan Sarwo, ibarat langit dan bumi. SBY meyakinkan ayahnya bahwa cinta tidak mengenal perbedaan status. Kebetulan Ny. Sarwo Edhie senang pada SBY yang pandai membawa diri. Ini merupakan lampu hijau bagi pasangan kekasih tersebut untuk melangkah lebih jauh. Namun pasangan itu tidak bisa segera melangkah ke pelaminan karena mereka harus berpisah, Ani ke Korea Selatan, mengikuti ayahnya yang jadi Dubes. Sedangkan SBY ke Amerika mengikuti pendidikan Airborne dan Ranger. Pernikahan baru bisa dilaksanakan 30 Juli 1976, bersama dua putri Sarwo Edhie lainnya yang juga mendapat jodoh tentara. Memang unik. Pesta pernikahan tiga pasang pengantin dilaksanakan pada pelaminan yang sama di Hotel Indonesia. Pesta itu sempat jadi tontonan para tamu hotel. Pasangan SBY-Ani dikaruniai dua putra. Putra tertua mereka, Agus Harimurti Yudhoyono, mengikuti jejak ayahnya, lulusan terbaik Akmil 2000. Sedangkan adiknya, Edhie Baskoro Yudhoyono, memilih kuliah di Curtin University, Australia. Karier militer SBY dengan pangkat Letnan Jenderal berakhir di pos Kepala Staf Teritorial TNI seiring dengan penunjukannya sebagai Menteri Pertambangan dan Energi dalam pemerintahan KH Abdurahman Wahid, tahun 1999. Sebenarnya Pangab Jenderal Wiranto telah merencananya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Sebagai imbalan, Wahid alias Gus Dur, memberinya pangkat jenderal kehormatan, tahun 2000. SBY dan keluarganya tidak tinggal di Komplek Perumahan Menteri, tetapi memilih rumah mereka sendiri di Puri Cikeas, Gunung Puteri, Bogor, yang dibangun di atas tanah seluas 3.000 meter persegi. Rumah itu cukup bersejarah buat mereka, karena di situlah SBY menyusun langkah menuju Istana Presiden. □

e-ti/ht-sh

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Lima Tahun, Jangan Diukur 100 Hari

Harapan rakyat setinggi gunung tak akan terpenuhi dalam 100 hari pertama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mustahil masalah-masalah kronis bangsa diselesaikan dalam tempo singkat.

Apakah janji kampanye Susilo, akrab dipanggil SBY, sudah terabaikan? "Program 100 hari pemerintah tidak untuk menyelesaikan semua masalah," kata SBY dalam pidato sebulan pemerintahannya (17/11).

Ketika berkampanye dan setelah dilantik menjadi presiden, SBY berjanji membikin gebrakan dalam 100 hari pertama pemerintahannya. SBY yang dilantik 20 Oktober, mempercepat pidato satu bulan pemerintahannya karena mulai hari Kamis sampai Selasa (18-23/11) berada di Cile untuk menghadiri pertemuan puncak APEC.

Terserah masyarakat memberikan penilaian. Presiden terpilih dengan jumlah suara yang meyakinkan itu, menetapkan 10 agenda yang segera dilakukan dalam sebulan pertama pemerintahannya.

Sepuluh langkah SBY, mencakup

konsolidasi pemerintahan; memosisikan dan mempelajari semua masalah; meninjau sejumlah kebijakan; menetapkan arah, agenda, dan prioritas; menyusun rencana pembangunan jangka menengah; membuat kontrak tanggung jawab; menunjukkan kesungguhan dan tekad yang tinggi dalam menjalankan tugas dan terapi kejut; menangani masalah aktual dan mendesak; menyelesaikan masalah kritis; penyesuaian sistem dan praktik ketatanegaraan yang telah mengalami banyak perubahan.

SBY masih harus secara cepat mempelajari kebijakan Presiden Megawati, khususnya yang bersifat mendasar dan aktual. Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB), kecuali tiga menteri yang sudah terlibat dalam Kabinet Gotong Royong, melakukan orientasi, adaptasi serta mengambil langkah-langkah awal.



PRESIDEN SBY UCAPKAN SELAMAT KEPADA MENTERI PERHUBUNGAN SEUSAI PELANTIKAN KIB ■ e-ti/setneg

Masalah-masalah aktual dan krusial yang mesti diatasi pemerintahan SBY, termasuk pengurangan subsidi BBM yang diperkirakan Rp 65 triliun pada tahun anggaran 2005, pembayaran utang dalam dan luar negeri yang sudah mendekati angka Rp 2000 triliun, pemberantasan KKN, pengangguran yang membelenggu sekitar 40 juta tenaga kerja, dan angka kemiskinan yang semakin mencemaskan, sekitar 70 juta jiwa. Memang tidak mudah bagi pemerintah mengatasi masalah-masalah yang berskala luas dan berjangka panjang tersebut.

Tetapi rakyat yang menaruh harapan segunung pada SBY, hanya ingin melihat perubahan segera, terutama yang berkaitan langsung dengan kehidupan mereka, misalnya lapangan kerja, biaya transpor, kesehatan, pendidikan dan harga sembako yang murah.

Semuanya membutuhkan dana yang tidak sedikit, sementara kemampuan anggaran sangat terbatas karena banyak tersedot oleh penyicilan utang dan berbagai subsidi. Devisa negara banyak tersedot oleh impor barang-barang mewah, bahkan komoditi pangan, di tengah kemampuan ekspor yang terus menurun. Masih ada setumpuk masalah lainnya, seperti nilai rupiah yang rentan terhadap fluktuasi, sektor perbankan dan sektor riil yang tertatih-tatih.

Dalam pidato 45 menit yang diberinya judul, *Mengenali Masalah, Menetapkan Agenda dan Arah*, SBY menegaskan tidak mungkin pemerintah melaksanakan semua kegiatan hanya dalam 100 hari. Untuk mengukur keberhasilan, pemerintah masih harus bekerja keras dalam lima tahun ke depan.

SBY seakan menyesalkan bahwa hampir semua pihak berbicara tentang program 100 hari. Halaman surat kabar, termasuk tayangan televisi, tidak pernah sepi dari ulasan program 100 hari pemerintah. Bahkan, sebagian kalangan meletakkan program 100 hari sebagai ukuran keberhasilan pemerintah.

Sang presiden tak ingin memperdebatkan masalah tersebut,



PRESIDEN SBY UCAPAN SUMPAH ■ e-ti/dok-sbyoke

tetapi yang jelas program 100 hari bukan untuk menyelesaikan semua masalah. Keberhasilan pemerintahannya tentu tidak mungkin diukur dengan tempo 100 hari.

Presiden pun menyegarkan dan mengangkat kembali visi dan misi yang dikemukakannya berulang-ulang dalam kampanye Pemilu 2004. Hal itu dianggapnya penting agar ada konsistensi, pemahaman utuh, dan bebas dari manipulasi.

SBY menguraikan secara ringkas garis besar agenda lima tahun dan program 100 hari, bidang per bidang, seperti yang kerap dikemukakannya dalam banyak kesempatan. Antara lain, pemerintah perlu segera memosisikan dan mempelajari semua isu, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, HAM, dan hankam, sampai komitmen menyelesaikan masalah-masalah di masa lalu yang belum terselesaikan.

Pemerintah, kata SBY, sedang mempelajari dan meninjau sejumlah kebijakan penting, seperti kebijakan fiskal, perindustrian dan pertanian, pendidikan dan kesehatan, pemberantasan korupsi, penyelesaian masalah Aceh, Papua dan terorisme, pembangunan

infrastruktur secara nasional, investasi dan perdagangan, serta kebijakan luar negeri.

Dalam hal penegakan hukum dan keadilan, Yudhoyono kembali mengemukakan akan memimpin dan mengambil langkah pemberantasan korupsi, pencegahan dan penindakan pelanggaran HAM berat, pemberantasan penyelundupan, *illegal logging*, *illegal fishing*, penanggulangan kejahatan narkoba dan kejahatan jalanan.

“Untuk pemberantasan korupsi, pemerintah telah dan sedang mempelajari semua aspek dan simpul yang mengakibatkan korupsi terus berlangsung,” kata SBY.

Dia, awal Desember ini, akan mengeluarkan instruksi presiden tentang pemberantasan korupsi, termasuk mekanisme dan kelembagaannya. Agar efektif, dia meminta para pemimpin benar-benar

memimpin dan memberikan teladan bagi penghapusan korupsi.

Setelah pengenalan masalah dan *review* kebijakan dinilai cukup, pemerintah segera menetapkan arah, agenda, dan prioritas pembangunan dan pengelolaan pemerintahan lima tahun mendatang. Agenda dan prioritas tersebut akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang harus selesai dalam jangka waktu tiga bulan. Pemerintah telah menetapkan Agenda 100 Hari Pertama KIB dengan arah, konsep, dan rencana yang tepat.

Agenda itu mencakup penyelesaian berbagai masalah kritis yang belum terselesaikan sebelumnya, tingginya subsidi BBM karena meningkatnya harga minyak di pasar internasional yang sangat membebani APBN, solusi terhadap masalah Karaha Bodas, peninjauan APBN 2005, termasuk penetapan angka defisit anggaran dan peninjauan asumsi harga minyak.

Agar manajemen pemerintah benar-benar dapat berlangsung secara efektif, kata presiden, dia telah menetapkan aturan main dan kode etik bagi seluruh jajaran pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah. □ e-ti

Susilo-Jusuf Perpaduan yang Serasi

Sebagai orang yang sama-sama berpikiran moderat, Susilo Bambang Yudhoyono dan M. Jusuf Kalla dapat bekerja sama untuk melakukan perbaikan dan menghasilkan kemajuan.



PRESIDEN SBY DAN WAPRES JK PADANAN SERASI, DIDAMPINGI ISTRI ■ e-tidok

Susilo, akrab dipanggil SBY, mau berubah dengan alasan yang memadai, realistis, menilai tinggi moralitas yang diyakini, dan memandang manusia setara. Sedangkan Jusuf mau berubah berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan menyesuaikan diri dengan realitas serta memanfaatkan perubahan dan kesempatan sebagai jalan mendapatkan hasil lebih baik.

Meski cenderung menghindari perubahan radikal, keduanya bersikap positif terhadap perubahan dan memiliki pengalaman terlibat dalam program perubahan di tingkat nasional, demikian analisis dua penulis senior, Bagus Takwin dan Niniek L. Karim.

SBY menunjukkan tanda-tanda mau melakukan perubahan dengan ikut menggodok kebijakan penarikan

anggota militer dari parlemen dan keterlibatan politik praktis. Jusuf Kalla menunjukkannya dalam perilaku bisnisnya yang beragam.

SBY yang cenderung melibatkan dan mendekati banyak pihak dalam tindakan politiknya, sejalan dengan Jusuf yang bisa memanfaatkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Seperti SBY, MJK yang senang menjadi penengah banyak mendapatkan kekuatan dari kemampuannya melakukan pendekatan dengan banyak pihak untuk bekerja sama. Ia dapat memperoleh tenaga lebih banyak melalui sinergi berbagai pihak, kemudian diarahkan untuk pencapaian hasil yang lebih menguntungkan, dibandingkan dengan melakukan usaha sendiri.

MJK pada praktiknya adalah

orang yang selalu menghitung keuntungan dan kerugian dari tindakan dan pilihannya. Indikasi ini terlihat dalam wawancaranya dengan *Tempo* (2 Mei 2004). "Secara materi, menjadi menteri tidak terlalu rugi. Segala biaya hidup saya ditanggung negara. Saya juga dapat gaji, rumah, dan mobil. Harus saya akui, untuk bisnis posisi menteri ada manfaatnya juga. Saya bisa tahu ada peluang atau informasi. Meski saya tak aktif di perusahaan, direktur saya bisa bertemu orang lebih mudah dan cepat."

Sedangkan SBY cenderung bertindak hati-hati agar tidak bentrok dengan pihak lain demi kepentingan menjadi orang yang dapat diandalkan dan mendapat perhatian banyak orang. Keduanya terbiasa menghitung langkah-langkah masing-masing dan menjadikan perpaduan mereka terhindar dari kemungkinan blunder politik dan kesalahan membuat kebijakan.

Bedanya, MJK lebih cepat dalam membuat keputusan, lebih konkret dan realistis dibandingkan SBY. Pengalaman sebagai pebisnis melatih MJK untuk melakukan spekulasi cepat dan tepat. Kemampuan MJK mencermati hal-hal konkret dan menggunakan prinsip ekonomi meningkatkan ketepatan pengambilan keputusan untuk tujuan memperoleh keuntungan besar.

SBY yang cenderung mempertimbangkan banyak hal dan tak ingin mengecewakan orang lain bisa diimbangi oleh kecepatan MJK mengambil keputusan. Begitu pula dengan kecenderungan SBY untuk menghindari situasi yang tak memiliki struktur yang jelas akan diimbangi oleh MJK yang dalam bisnisnya selalu dituntut berspekulasi.

Kemauan dan kemampuan mereka beradu argumentasi memungkinkan keduanya saling berdiskusi dan mencapai pemahaman bersama dalam menentukan tindakan-tindakan

yang akan mereka ambil. Kerja sama keduanya kemungkinan didasari oleh pemahaman satu sama lain dan penguasaan terhadap materi yang sedang digarap, mengingat keduanya senang belajar. Kemampuan belajar dengan cepat memungkinkan mereka untuk mengolah permasalahan yang ada dan melakukan perbaikan dalam waktu cepat.

Sifat realistis keduanya mengarahkan kepada masalah secara terfokus dan menemukan solusi yang efektif. Tingkat kecerdasan yang relatif setara menjadikan mereka mitra sejajar dalam perdebatan dan pembahasan berbagai macam persoalan. Kebutuhan intelektual masing-masing akan dapat terpuaskan satu sama lain.

Masalah mungkin akan bisa muncul dalam hubungan mereka jika kecenderungan MJK yang cepat membuat keputusan bertabrakan dengan sikap hati-hati SBY, terutama untuk keputusan-keputusan yang membutuhkan improvisasi dan berkaitan dengan kepentingan banyak orang. Untuk mengatasi ini, keduanya perlu meningkatkan rasa saling menghargai satu sama lain dan mengambil manfaat positif dari perbedaan itu. Sejak awal perlu disadari kemungkinan pertentangan yang disebabkan perbedaan itu untuk dapat memanfaatkan kelebihan dan mengisi kekurangan satu sama lain.

Kekurangan lainnya dari pasangan ini berkaitan dengan tiadanya visi yang jauh ke depan.

Sebagai orang yang realistis, keduanya cenderung lebih merespon masalah-masalah yang ada di depan mata. Keduanya kurang terbiasa melakukan lompatan-lompatan besar. Mereka mampu membenahi kekurangan, menyelesaikan masalah yang ada, tetapi kurang memiliki imajinasi tentang masa depan sehingga sulit melakukan terobosan jauh ke depan.

Setelah melakukan perbaikan dan pembenahan, pasangan ini lambat bergerak, apalagi jika mereka sudah berada di posisi yang aman dan nyaman. Di posisi itu mereka menjadi cenderung konservatif sampai muncul lagi masalah dan kebutuhan perbaikan. Kemajuan-kemajuan kecil dapat diharapkan dari mereka karena keduanya didorong oleh kebutuhan berprestasi, tetapi kecenderungan mengambil risiko moderat dan target yang realistis tidak terlalu membawa mereka kepada kemajuan lebih jauh.

SBY-MJK akan memuaskan banyak orang yang membutuhkan perbaikan ekonomi, tetapi bisa mengecewakan rakyat yang mengharapkan kemajuan besar melalui perubahan-perubahan signifikan. Mengingat persaingan antarnegara dewasa ini cukup ketat, memang dibutuhkan usaha-usaha untuk memajukan Indonesia. Pembenahan dan perbaikan dibutuhkan di awal masa pemerintahan, selanjutnya dibutuhkan program yang lebih visioner tetapi realistis.

Kedua pemimpin tertinggi negara ini memiliki kesediaan untuk

melakukan perubahan signifikan, tetapi membutuhkan banyak dukungan. Keduanya harus dibuat ditantang dengan masalah-masalah potensial yang antisipatif, seperti bagaimana menjadikan pendidikan Indonesia dapat seunggul pendidikan Eropa dan Amerika serta akan bagaimana teknologi pertanian menghasilkan varietas unggul yang belum ditemukan oleh negara-negara lain. Tantangan-tantangan seperti itu dapat mengisik kebutuhan untuk berprestasi dan menggerakkan keduanya untuk membuat program-program yang lebih visioner.

Kecenderungan untuk tidak larut dalam satu masalah, mampu berpikir dingin dan jernih dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat menghasilkan solusi yang baik. Kemampuan ini memberi kesiapan pada mereka untuk menangani masalah dengan cepat sehingga ada banyak waktu melakukan program-program peningkatan kualitas masyarakat Indonesia. Usul-usul kreatif dan produktif bisa berpotensi mendapat tempat dalam pemerintahan mereka, hanya saja keduanya perlu diyakinkan oleh berbagai pihak tentang pentingnya perubahan.

Kehati-hatian dan kecepatan pengambilan keputusan yang disertai dengan kemampuan memanfaatkan kesempatan akan menjadi kekuatan terbesar pemerintahan SBY-MJK. Jika disertai dengan pandangan visioner, hal itu akan menjadi kekuatan Indonesia untuk menjadi negara yang jauh lebih maju dari kondisi saat ini.

Tentu saja kerja yang sangat keras harus dilakukan karena banyak peninggalan masalah dari masa lalu yang tidak mudah diselesaikan. Kesungguhan dan manajemen pemerintahan yang efektif dapat diandalkan untuk menyelesaikannya. Ketegasan untuk menindak pelaku korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta ketegasan pencegahan terjadinya penyimpangan perlu dilakukan sejak awal pemerintahan mereka. Kekayaan Indonesia yang luar biasa menjadi modal sangat besar jika itu digunakan secara efisien.

Bukan hanya kesejahteraan yang bisa dicapai, tetapi juga kemajuan, jika pemanfaatan itu digunakan sebaik-baiknya. □ e-ti/sh



MENTERI KIB DILANTIK PRESIDEN SBY ■ e-ti/setneg



WAKIL PRESIDEN JUSUF KALLA DAN MANTAN WAPRES HAMZAH HAZ SERTA PRESIDEN SBY ■ e-ti/setneg

JK PRIORITAS PEMULIHAN EKONOMI

Hidup sahaja, menjauhi kemewahan. Inilah prinsip yang ditanamkan Muhammad Jusuf Kalla kepada dirinya sendiri, keluarga, saudara-saudara serta orang-orang di sekelilingnya. Jusuf tak akan pernah mengubah sikapnya meskipun tengah menduduki kursi wakil presiden.

Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan (15 Mei 1942) ini, sebenarnya mampu hidup mewah, karena dia pemilik “kerajaan” bisnis Hadji Kalla dan Bukaka Grup. “Jangan bermewah-mewah di atas penderitaan rakyat,” kata Jusuf kepada E-TI dalam suatu kesempatan wawancara.

Dalam dialek Bugis, nama Jusuf biasa dipanggil Ucu. Jusuf lahir dari pasangan pedagang Bugis, H. Kalla dan Hj. Athirah. Ayahnya mendirikan NV Hadji Kalla Trading Company, tahun 1965. Dan nama itu, kini telah menjadi sebuah jaringan konglomerasi. Ucu dibesarkan dalam sebuah keluarga besar. Dia putra kedua dari 17 bersaudara lelaki dan perempuan. Pasangan setianya, Mufidah, perempuan berdarah Minang. Pasangan Ucu-Mufidah dikarunia lima orang anak— Lisa, Ira, Elda, Ihin, dan Chaerani.

Selama menduduki kursi Memperindag, Menko Kesra dan sekarang Wapres, Ucu menolak berkantor di gedung megah dan ruangan mewah. Dia memilih kantor yang

sederhana. Ucu tidak ingin berkantor di Istana Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, lebih memilih Bina Graha, berdekatan dengan kantor Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, secara lahiriah Ucu memberi teladan hidup jujur, bersih dan bersahaja.

Di tengah arus kehidupan mewah yang dipertontonkan banyak pejabat negara, Ucu merupakan sosok pemimpin yang langka. Ucu dan keluarganya semata-mata hidup dari gaji bersih (*take home pay*), tidak ingin menerima macam-macam pendapatan sampingan. Dia menggunakan fasilitas jabatan seminimal mungkin. Karena itu, perusahaannya memberi subsidi bulanan bagi kegiatan ekstranya.

Amatlah naif jika bekas atasannya, mantan Presiden KH Abdurahman Wahid, menudingnya sebagai koruptor. Namun Wahid alias Gus Dur tak pernah bisa membuktikan tuduhannya. Gus Dur melakukan kesalahan yang mengantarkan pada kejatuhannya, yaitu memecat Ucu dari kursi

Memperindag dan Kepala Bulog hanya setelah menjabat enam bulan.

Di dalam bukunya, *Menteri Enam Bulan*, Ucu menguraikan berbagai anekdot ketika berada dalam pemerintahan Gus Dur. Satu di antaranya, dia selalu kebagian waktu yang sial. Ketika dia menyampaikan laporan, Gus Dur selalu dalam keadaan tidur.

Ucu bukan hanya petinggi negara, tetapi juga pengusaha, politisi dan muslim yang taat. Kombinasi dari keempat elemen tersebut menempanya jadi tokoh yang hampir paripurna. Ucu seorang tokoh lintas agama, ras dan suku. Baginya, kebersamaan di dalam perbedaan menjadi kalimat kunci di dalam membangun bangsa yang heterogen ini.

Dia seorang arsitek kehidupan berdampingan secara damai. Dialah yang meletakkan fondasi perdamaian bagi dua kelompok yang bertikai di Poso dan Ambon, dikenal dengan Kesepakatan Damai Malino I dan II. Pengalaman pribadinya, memberi bekal baginya tegar menghadapi dan mengatasi

krisis.

Ketika Ucu berusia 25 tahun, perusahaan ayahnya, NV Hadji Kalla, ditimpa krisis serius. Saat itu (1967), karyawan NV Hadji Kalla tinggal satu orang. Dalam sebuah dialog yang menentukan perjalanan panjang NV Hadji Kalla ke depan, sang ayah bertanya kepada putra keduanya: "Bagaimana dengan perusahaan keluarga?" Pertanyaan berikutnya, "Apakah ditutup saja?"

Mendengar pertanyaan pertama, Ucu hanya terdiam. Tetapi ketika mendengar pertanyaan kedua, dia tersentak. Ucu mengambil keputusan meninggalkan aktivitasnya di KAMI Sulsel, memusatkan diri pada pembenahan perusahaan ayahnya.

Kini NV Hadji Kalla telah menjadi sebuah kelompok konglomerasi yang mempekerjakan ribuan karyawan, baik di Jakarta maupun di Makassar.

Ucu memang memiliki naluri bisnis yang tajam. Dia tidak hanya berbisnis dengan naluri tetapi juga dengan profesionalisme karena dia pemegang gelar sarjana ekonomi dari Universitas Hasanuddin, Makassar (1967). Juga tamatan The European Institute of Business Administration, Fountainebleau, Perancis (1977).

Tatkala menjabat Menko Kesra dalam pemerintahan Presiden Megawati, dia masuk dari sisi kejahteraan dalam menangani konflik berdarah di Poso dan Ambon. Akar konflik adalah kemiskinan, baik dalam bentuk materi maupun non-materi, bukan lantaran perbedaan agama. Pihak-pihak yang bertikai, harus diberikan kesadaran untuk menghentikan konflik dengan cara damai bukan perang.

"Semua agama melarang membunuh tanpa alasan yang jelas. Karena itu pembunuhan tidak masuk sorga, malah masuk neraka," kata Ucu kepada mereka dengan nada tinggi.

Maka Ucu berhasil menyelesaikan konflik di Poso dan Ambon dengan kesepakatan damai Malino I dan II. Selepas kesepakatan tersebut memang masih terjadi percikan konflik di kedua daerah. Itu bagian dari upaya kaum separatistis untuk menghidupkan kembali konflik. Namun masyarakat sudah tidak lagi mudah terprovokasi.



WAPRES JK UCAPKAN SUMPAH ■ e-ti/dok

Tak Menghindari Persoalan

Ucu tak pernah gentar terjun langsung ke masyarakat yang diamuk konflik. Sebab dia percaya, lewat dialog langsung dengan masyarakat bawah, persoalan apa saja bisa ditemukan jawabannya. Jangan biarkan persoalan menumpuk tanpa jalan keluar.

Kesejahteraan, kata Ucu, semestinya diberi pengertian yang luas, bukan sekedar menangani bencana gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor atau gelombang pengungsi. Semestinya diterjemahkan sebagai kesejahteraan rakyat secara menyeluruh.

Kesra bisa juga diartikan sebagai lawan dari kehidupan mewah di atas penderitaan rakyat. Karena itu, Ucu takkan pernah mentolerir perbuatan korup, komersialisasi jabatan, KKN dan kejahatan birokrasi lainnya. Karena itu para pejabat negara menjauhi kehidupan mewah yang sangat konsumtif, menunjukkan solidaritas kepada rakyat miskin.

Kata Ucu, kesepahaman kolektif dan kesadaran berbangsa, tumbuh dari

keteladanan para pejabat negara di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Amat tidak bermoral jika segelintir orang hidup mewah di tengah puluhan juta orang yang hidup menderita. Maka amat bijaksana bilamana mereka yang mempunyai menyisihkan pengeluaran yang tidak perlu untuk kaum duafa.

Ucu benar-benar merasakan kepapaan yang menimpa jutaan rakyatnya. Karena itu dia menolak semua bentuk kemewahan, baik di rumah maupun di kantor-kantornya. Dia tidak mau menggunakan perabot mewah, baik di kantor jabatan maupun perusahaannya. Padahal dia seorang pengusaha yang berkecukupan.

Pria berdarah Bugis ini seorang tokoh lintas agama dan politik. Tatkala Megawati di ujung tanduk, Ucu yang mewakili Partai Golkar, tidak menghendaki adanya pengelompokan agama dan partai politik untuk menjatuhkan sebuah pemerintahan. Dia hanya ingin menghadiri pertemuan, saat itu dikenal dengan kaukus, bukan untuk menggulingkan Mega tetapi untuk mencari solusi.

Di dalam forum seperti itu, Ucu malahan menolak bicara tentang umat Islam, tetapi berbicara tentang nasib bangsa. Kalau bicara tentang

bangsa, itu sudah mencakup 85 persen umat Islam. Kalau bangsa ini sehat dan kuat, Islam pun kuat. Umat membutuhkan pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang mengabdikan kepentingan bangsa secara keseluruhan.

Sekarang pun, setelah menjadi orang kedua di pucuk pemerintahan, Ucu tak akan berubah. Dia malah lebih leluasa menerapkan prinsip hidup berdampingan secara damai. Ucu bukanlah muslim partisan, tetapi berjiwa kebangsaan. Dia diajarkan oleh orang tuanya untuk menghormati prinsip dan sikap orang lain yang berbeda agama, ras, suku, dan garis politik. Ucu seorang kompromis, bukan partisan yang sangat fanatik pada golongannya, meskipun dia anggota NU.

Ayahnya, H. Kalla, mengajarkan prinsip hidup dengan kerja keras, jujur, sederhana dan menghormati orang lain. Sikap jujur membuatnya tidak pernah menciderai janji, komitmen, dan kesepakatan bersama.

Ucu tak ingin menjanjikan sesuatu yang tidak bisa dipenuhinya. Selain gaji, Ucu tak ingin mengambil apa pun dari negara. Dia menggunakan fasilitas negara secara tepat

dan proporsional. Karena dia tahu setiap sen milik negara adalah hasil keringat rakyat.

Bisa Dipulihkan

Nalurinya sebagai ekonom dan praktisi bisnis, membuat Ucu yakin bahwa krisis yang menggegeroti ekonomi Indonesia sejak pertengahan 1997 bisa dipulihkan, asalkan tidak terlalu bergantung pada bahan impor.

Jangan sampai dana untuk keperluan sembako sekalipun diutang dari luar negeri. "Masih ada celah-celah menguntungkan yang bisa dikerjakan," kata Ucu. Kata kuncinya, memacu agribisnis dan agroindustri.

Memacu agroindustri dan agribisnis berarti mencari dolar dengan biaya rupiah. Ini sebuah pemikiran sederhana, tetapi tepat sasaran. Jadi, kata Ucu, motor kebangkitan ekonomi adalah kedua sektor tersebut.

Selama ini orang justru bicara terlalu banyak dan berat pada industri barang pabrikan yang memerlukan bahan baku impor. Itu mungkin karena lebih memberikan gengsi. Dia ingin mengingatkan, berbicara tentang industri jangan hanya melihat eksponnya, tapi lihat juga impornya.

Ucu heran, pada era krisis ekonomi ini, semua orang hanya bicara soal moneter. Semua orang bicara dolar, rupiah, dan kurs. Semua orang memaki-maki, berbicara tentang kesulitan, tentang harga diri. Tidak ada yang berbicara mengenai pengembangan sektor riil yang tidak membutuhkan komponen impor, seperti agribisnis dan agroindustri.

Sedangkan bisnis untuk ekspor baru bisa dikatakan berhasil kalau memenuhi tiga syarat. *Pertama*, menghasilkan devisa neto, bukan devisa saja. *Kedua*, membuka lapangan kerja. *Ketiga*, memiliki efek berganda.

Kata Ucu, mengatasi kesulitan ekonomi nasional hanya bisa dilakukan dengan meningkatkan ekspor hasil pertanian dan mengurangi impor. Dia merujuk kepada upaya yang dilakukan di daerah asalnya, Sulawesi Selatan. Daerah ini harus mengambil kesempatan dengan meningkatkan produksi lewat intensifikasi dan ekstensifikasi. Ini sesuai dengan pola pengembangan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Perhitungannya sederhana saja, agar produksi meningkat dua kali lipat. Petani membutuhkan rangsangan agar mau menaikkan produksi. Insentifnya, harga komoditi yang naik sampai tiga kali lipat. Mereka hanya memerlukan lahan yang baik, bibit yang baik, peralatan, dan modal.

Kendala utamanya permodalan. Bank menetapkan kebijakan likuiditas ketat terhadap kegiatan pertanian. Ada visi yang berbeda dari berbagai pihak yang terkait di dalam meletakkan dasar kebijakan. Padahal kemauan politisnya sudah gamblang. Di dalam kondisi moneter yang tidak menentu, sektor pertanian harus mendapat kesempatan yang lebih besar karena terbukti

mampu mendorong ekspor non-migas.

Para sarjana pertanian harus didorong untuk mengisi sektor-sektor agribisnis yang telah berkembang dengan baik. Mereka inovatif dan punya idealisme yang segar. Ini juga membuat perguruan tinggi tidak hanya terkungkung di menara gading, tetapi terjun ke lapangan. Dunia pendidikan harus tahu kebutuhan riil di lapangan.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan telah memberi pelajaran yang cukup mahal. Sektor agribisnis dilihat dengan sebelah mata. Semestinya sektor ini menjadi fokus perhatian, baik oleh pemerintah maupun pengusaha. Sektor ini diandalkan sebagai penyumbang devisa karena tidak terpengaruh gejolak moneter.

Mereka yang mengeluh kesulitan adalah para pengusaha yang menerima pendapatan rupiah, tetapi belanjanya dengan dolar AS lantaran harus mengimpor bahan baku. Sebaliknya, para petani beruntung karena belanjanya rupiah, penghasilannya dolar. Sebab, sektor pertanian tidak membutuhkan komponen impor. Pelaku utamanya rakyat, dengan demikian secara alamiah membentuk struktur perekonomian yang tangguh.

Seluruh kegiatan ekspor di kawasan Indonesia Timur murni dari hasil perkebunan, kehutanan dan perikanan. Berbeda dengan pelaku industri dan bisnis di Jawa yang menghasilkan barang ekspor dari bahan baku impor. Memang industri padat karya yang berorientasi ekspor diperlukan, tetapi tidak dalam bentuk program kilat demi tujuan politis.

Dalam kondisi nilai rupiah yang sangat fluktuatif, jalan terbaik mengeksport produk agribisnis. Nilai dolarnya sama, tetapi akan jauh lebih besar setelah dikonversikan ke dalam rupiah. "Inilah hikmah dari krisis moneter," kata Ucu.

Ucu memiliki gagasan, setiap daerah melipatgandakan produk pertaniannya untuk meraup dolar. Sulawesi Selatan sudah melakukannya, hasilnya berlipat ganda.

Misalnya, para petani coklat. Mereka menikmati lonjakan harga coklat. Merekalah yang mampu membeli mobil atau sepeda motor hanya dengan beberapa ton coklat. Juga para petambak udang. Sekarang mereka bisa menjual udang dengan harga Rp



WAPRES JK UCAPKAN SELAMAT KEPADA PARA MENTERI KIB ■ e-ti/setneg

100.000 per kilogram. Padahal dulu hanya Rp 30.000 per kilogram.

Secara umum, perekonomian sedang menghadapi kesulitan, tetapi tidak semua orang di republik ini menderita. Jangan semua orang terus bicara tentang kemiskinan. Yang penting berbuat untuk mengatasi kemiskinan, misalnya, lewat usaha kecil. Bank mengabaikan usaha kecil padahal mereka berhubungan dengan rakyat kecil, membuka ruang usaha dan lapangan kerja.

Karena usaha kecil tumbuh secara alamiah, pihak lain beranggapan bahwa bantuan dan pendidikan terhadap mereka tidak diperlukan. Semestinya mereka bisa bermitra dengan usaha menengah dan besar. Dalam bentuk kemitraan yang saling memberi manfaat. Dalam posisi saling membutuhkan, bukan semata-mata lantaran dipaksakan atau belas kasih.

Menurut Ucu, pembangunan ekonomi kerakyatan perlu pemihakan kebijakan pemerintah yang konsisten terhadap pelaku ekonomi golongan kecil dan menengah. Pemerintah juga harus secara konsisten memberantas semua bentuk distorsi yang jelas-jelas menghambat ekonomi kerakyatan.

Untuk itu, Ucu tidak setuju jika usaha besar dihabiskan. Nyatanya mereka telah berperan dalam sistem perekonomian Indonesia dewasa ini. Tetapi mereka jangan hidup sendiri di dalam kerajaan bisnisnya, sehingga ekonomi rakyat di sekitarnya mati.

Sistem ekonomi kerakyatan, kata Ucu, harus memberi kesempatan seluas-luasnya kepada usaha rakyat. Ini merupakan nafas demokrasi di dalam perekonomian. Ekonomi rakyat bisa dikembangkan lewat koperasi. Mereka hanya memerlukan modal dan keterampilan. Untuk memperoleh modal semestinya kebijakan bank yang mudah dan cepat serta berbunga rendah. □ e-ti/crs-tsl-sh

Peluang dan Tantangan Duet SBY-JK

Boleh jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, akrab disebut SBY, ikon baru Indonesia setelah era Soekarno dan Soeharto. SBY-kah yang ditunggu-tunggu sebagai sang *Satria Piningit* untuk memulihkan kondisi republik yang sedang sakit? Kepemimpinan SBY-JK masih perlu diuji, apakah dia mampu atau tidak, mengatasi masalah yang menggantung.

Tinjauan Historis. Referensi sejarah berikut ini dimaksudkan untuk mengukur derajat masalah keamanan, politik, ekonomi, dan diplomasi yang dihadapi pemerintahan SBY dibandingkan dengan pemerintahan Bung Karno dan Pak Harto.

Di tengah gejolak internasional akibat Perang Dunia II, para pejuang secara sepihak merampas kemerdekaan dari tangan tentara pendudukan Jepang. Dwitunggal Soekarno-Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 1945. Namun di dalam perjalanannya, pemerintahan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta menghadapi kendala keamanan, politik, diplomasi dan ekonomi yang gawat.

Di banyak daerah di Jawa, Sumatra dan Sulawesi, terjadi gejolak akibat masih eksisnya tentara pendudukan Jepang dan kehadiran tentara Sekutu (September 1945). Tentara NICA (Belanda) membonceng tentara Sekutu yang punya misi melucuti tentara Jepang. Di punggung tentara Sekutu, NICA ingin mengukuhkan kembali penjajahan Belanda di Indonesia.

Di sektor keamanan, kekuatan bersenjata republik masih tercerai berai. Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru terbentuk, 5 Oktober 1945. Selain rongrongan NICA (1948-1950), negara seusia bayi ini menghadapi pemberontakan PKI di Madiun (1948). Di kemudian hari terjadi rentetan pemberontakan yang dipimpin oleh Tk. Daud Buereuh di Aceh, Kolonel Simbolon di Sumatra Utara, Syafruddin Prawiranegara dan Sumitro (PRRI) di Sumatra Barat, Kartosoewirjo di Jawa Barat dan Kahar Muzakar di Sulawesi Selatan.

Baru empat bulan berjalan, pemerintahan presidensial Bung Karno berubah haluan menjadi semi parlementer dengan keluarnya maklumat pemerintah, 14 November 1945. Pemerintahan sehari-hari dilaksanakan oleh Perdana Menteri Sjahrir yang merangkap menjadi Menteri Dalam dan Luar Negeri. Jelas ini penyimpangan terhadap UUD 1945, dan menimbulkan gejolak politik.

Belanda memanfaatkan situasi, mendukung pembentukan pemerintahan boneka Republik Indonesia Serikat (27/12-49 s/d 17/8-50) yang menguasai hampir separuh wilayah Indonesia. Pemerintahan NKRI di bawah Soekarno dan Hatta terpaksa memindahkan ibukotanya ke Yogyakarta. Ketika tentara Belanda berhasil menduduki kota Yogya, Bung Karno ditangkap dan dibawa ke Bengkulu. Sedangkan Hatta dibuang ke Banda. Panglima TNI Jenderal Soedirman, dalam kondisi sakit-sakitan, memimpin perang gerilya di daerah pegunungan Wilis. Kepala pemerintahan darurat dipercayakan kepada Mr. Sjafruddin Prawiranegara yang sedang berada di Sumatra Barat.

Namun pasukan TNI pimpinan Kolonel Soeharto di luar kota Yogya terus mengganggu posisi tentara pendudukan Belanda, melancarkan serangan umum ke kota Yogya (Maret 1949). Aksi-aksi militer republik menarik perhatian dunia bahwa pemerintahan Bung Karno masih eksis. Sejumlah negara sahabat mendesak sidang Dewan Keamanan PBB. Tahun 1950, DK-PBB memberi rekomendasi agar Belanda menarik pasukannya. Akhirnya kemerdekaan RI mendapat pengakuan internasional.

Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta untuk memimpin pemerintahan. Namun pemerintahan tetap berjalan di bawah sistem parlementer. UUD Sementara (1950) malahan melegalisasi sistem parlementer yang sangat liberal. Pemerintahan perdana menteri jatuh bangun, sementara republik dirongrong oleh berbagai pemberontakan dan kemelut ekonomi.

Tahun 1955, Bung Karno menyetujui penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih Dewan Konstituante yang akan merumuskan UUD yang bersifat tetap, menggantikan UUDS. Pemilu di bawah sistem demokrasi liberal itu menghasilkan empat partai pemenang; PNI, Masyumi, NU dan PKI.

Namun Pemilu tidak meredakan gejolak politik dan keamanan. Sampai tahun 1959, situasi terus memburuk, karena DK tidak berhasil menetapkan UUD yang baru. Masyumi dan PSI dibubarkan oleh presiden karena terlibat pemberontakan. Untuk menyelamatkan republik dari bahaya kehancuran, dengan dukungan TNI, Bung Karno mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959. DK dibubarkan dan pemerintah menerapkan kembali UUD 1945. Bung Karno memerintah dengan dekrit dan menyatakan diri sebagai presiden seumur hidup. Lembaga parlemen; para anggota MPRS dan DPRGR diangkat oleh presiden.

Pada paruh akhir kekuasaannya, Bung Karno, tanpa didampingi Wakil Presiden, kembali diguncang oleh gejolak keamanan dan politik. Gerakan Tiga Puluh September (1965) yang dimotori PKI dan perwira-perwira TNI berhaluan kiri, mengakibatkan pertumpahan darah yang tak terperikan. Mereka membunuh tujuh perwira tinggi Angkatan Darat. Lantas ratusan ribu anggota PKI tewas dalam gelombang balas dendam oleh tentara dan massa. Meskipun enggan membubarkan PKI, Bung Karno yang memihak blok timur (komunis), berhasil menjaga keutuhan republik.

Orde Baru. Pangkostrad Mayjen Soeharto yang memimpin operasi penumpasan PKI, muncul sebagai ikon baru menggantikan Bung Karno. Saat itu, negara-negara Blok Barat (kapitalis), memberi dukungan penuh bagi pengalihan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto.

Ketika menjadi pejabat sementara presiden tahun 1966, Pak Harto dihadapkan pada situasi keamanan, politik, dan ekonomi yang kacau balau. Laju inflasi mencapai 600 persen. Dalam situasi yang serba tidak pasti, militer mengendalikan kehidupan politik.

Pemerintahan Pak Harto mampu mengatasi kemelut keamanan berkat dukungan kuat rakyat yang ingin segera melihat perubahan. Di sektor ekonomi pemerintah Orba memberi arah yang jelas bagi pemulihan ekonomi lewat

Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sedangkan di bidang diplomasi, Pak Harto berhasil memasukkan kembali RI ke PBB yang ditarik keluar Bung Karno semasa konfrontasi dengan Malaysia (1964-1965).

Setelah MPRS mengukuhkannya sebagai presiden (1967), Pak Harto mencanangkan Pemilu tahun 1971. Pemilu diikuti oleh PNI, PSII, PMI, NU, Partai Katolik, Partai Kristen, IPKI, Murba, Ikatan Tarbiyah dan Golkar. Ketika itu Golkar tampil dengan slogan yang cukup ampuh: *Development Yes, Politics No* atau *Terima Pembangunan, Tolak Politik*.

Rakyat yang jenuh dengan politik menerima ajakan Golkar, Golkar pun tampil sebagai pemenang. Tetapi ABRI yang tidak ikut Pemilu diberi jatah 100 kursi di DPR dan MPR. Sementara Opsus (operasi khusus, intelijen) yang dipimpin Letjen Ali Murtopo, melakukan gerakan pembusukan partai-partai. Kejanggalaan demokrasi mulai terlihat dari sini.

Di bawah kepemimpinan Ali Murtopo dan Letjen (Pur) Sudjono Humardani (Aspri presiden), peranan CSIS cukup menentukan, menggodok konsep politik dan ekonomi Orba. Semua konsep politik dan pembangunan Orba, termasuk Dwi Fungsi ABRI dan penyederhanaan partai politik, terangkum dalam buku Ali Murtopo, *Akselerasi Pembangunan 25 Tahun*.

Hasilnya Pemilu 1977 hanya diikuti tiga organisasi politik, PPP, PDI dan Golkar. Sejak itu, Golkar memenangkan Pemilu secara mutlak. Di puncak kekuasaannya, Pak Harto hampir tidak mengalami gangguan keamanan dan politik yang berarti, kecuali gerakan-gerakan sporadis kaum separatis di Aceh, Irija dan Timor Timur. Pembangunan ekonomi berjalan lancar.

Program pembangunan ekonomi Orba didukung penuh oleh negara-negara kapitalis. Trilogi Pembangunan yaitu Stabilitas Keamanan, Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan, selain pemuliharaan ekonomi, juga melahirkan "anak haram" kolusi antara birokrat, konglomerat keturunan China dan para investor asing. Akibatnya korupsi meluas, hak-hak buruh terabaikan, pemerataan tersendat-sendat.

Tanda-tanda berakhirnya pemerintahan Pak Harto menjadi jelas ketika krisis moneter melanda Asia (1997), tetapi di Indonesia krisis itu berlarut-larut. Pemerintahan Pak Harto mulai mengalami krisis kepercayaan. Musuh-musuh politiknya mulai berani melancarkan kritik terbuka bahwa Pak Harto pemimpin otoriter yang mengkerdikan demokrasi.

Perlawanan terhadap Pak Harto, baik dari dalam tubuh Golkar dan kabinetnya sendiri, maupun dari para aktivis mahasiswa, LSM dan akademisi, memuncak Mei 1998. Akhirnya, Pak Harto mengundurkan diri 21 Mei 1998, diganti oleh Wakil Presiden B.J. Habibie.

Terlepas dari semua kekurangannya, Pak Harto berhasil menyelamatkan bangsa ini dari bahaya perpecahan, membangun berbagai sarana dan prasarana ekonomi serta mengangkat nama baik bangsa di mata dunia internasional.

Reformasi. Kejatuhan Pak Harto disusul oleh gelombang reformasi yang hampir menghanyutkan sendi-sendi kehidupan bangsa. Krisis ekonomi semakin dalam, gangguan keamanan meningkat, pengangguran dan kemiskinan meluas, martabat bangsa terpuruk.

Pemerintahan Habibie berhasil membenah ekonomi dan meletakkan dasar bagi demokrasi. Kemelut politik dan keamanan yang meningkat mampu diredam oleh TNI. Namun pemerintahan Habibie berumur pendek. Semestinya dia meneruskan pemerintahan Pak Harto sampai tahun 2003. MPR mempercepat Pemilu tahun 1999, menetapkan masa jabatan presiden hanya dua kali 5 lima tahun.

Pemilu menghasilkan PDIP sebagai partai pemenang,

disusul Golkar, PPP, PKB, PAN dan PBB. Dalam pemilihan presiden (Juni 1999) Habibie menarik diri, Megawati kalah, KH Abdurrahman Wahid tampil sebagai pemenang.

Harapan rakyat bagi perubahan kembali memudar, karena Wahid alias Gus Dur tidak mampu mengakhiri gejala keamanan, politik, dan ekonomi. Kabinet berubah-ubah dalam hitungan pekan. Ulah, pernyataan dan kebijakan Gus Dur malah membuat situasi politik, keamanan, dan ekonomi memburuk.

Skandal dana Bulog Rp 35 miliar, mempercepat sidang istimewa MPR yang mengoreksi kepemimpinan Gus Dur. Tetapi di puncak krisis kepercayaan terhadap pemerintahannya, Gus Dur mengeluarkan dekret. 21 Juli 2001. Gus Dur membubarkan MPR, DPR, dan Golkar. Usia dekret hanya dalam hitungan jam, karena tidak didukung oleh TNI, dan disusul oleh sidang istimewa MPR yang mendepak Gus Dur. MPR mengangkat Wapres Megawati. Pemimpin PPP, Hamzah Haz, memenangkan pemilihan Wakil Presiden.

Pemerintahan Presiden Megawati berjalan di tengah gejolak teror bom serta perlawanan kaum separatis di Aceh dan Ambon. Disusul perlawanan mahasiswa yang memuncak awal tahun 2003, karena tuduhan menyuburkan KKN. Untungnya perhatian masyarakat beralih ke invasi pasukan AS dan sekutunya ke Irak. Posisi Megawati terselamatkan.

Megawati akhirnya berhasil memperbaiki fundamental ekonomi, menekan gejolak politik, keamanan dan separatisme. Tetapi gagal menekan KKN, pengangguran dan kemiskinan.

Megawati tercatat sebagai presiden yang berhasil meletakkan landasan bagi pembangunan politik dan demokrasi di masa datang. Di tangannya, tiga pemilihan umum (legislatif dan presiden dua tahap) dalam setahun berjalan aman, lancar dan demokratis. Meskipun Megawati sendiri disisihkan oleh SBY.

Pilihan Rakyat. SBY-JK mendapat legitimasi yang tangguh dari rakyat, meraih lebih dari 60 juta suara. Mungkin dia ikon baru setelah Bung Karno dan Pak Harto. SBY beruntung, sebab mewarisi sistem politik dan demokrasi yang sudah tertata. Keamanan relatif kondusif, setelah meredanya teror bom dan gerakan separatis Aceh serta Ambon.

Namun SBY menerima segunung masalah sosial, ekonomi dan hukum. Masalah sosial mencakup angka kemiskinan dan pengangguran yang sangat tinggi, pemulangan TKI ilegal dari Malaysia, konflik sosial yang meletus secara sporadis serta penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda.

Di bidang ekonomi, SBY mewarisi setumpuk masalah yang belum mampu diselesaikan oleh Megawati. Misalnya subsidi BBM Rp 63 triliun akibat melonjaknya harga minyak di pasar internasional, utang dalam dan luar negeri yang hampir menyentuh angka Rp 2.000 triliun, sektor riil dan perbankan yang masih terseok-seok, penyelundupan, pencurian kayu dan kekayaan laut.

Di sektor penegakan hukum, pemerintahan SBY harus memberantas KKN yang hampir tak tersentuh oleh pemerintahan Megawati. Tugas yang tidak kalah pelik adalah menghentikan budaya korupsi di kalangan aparat penegak hukum.

Sedangkan pemulihan citra bangsa di mata masyarakat dunia, tergantung pada keberhasilan pemerintah meredam terorisme, memulihkan ekonomi dan memberantas korupsi. Sebab Indonesia masih digolongkan sebagai sarang teroris, negara terkorup di Asia dan terkorup ketiga di dunia.

Inilah peluang dan tantangan yang menghadang pemerintahan SBY-JK. □ **e-ti/syahbuddin hamzah**

Profil Menteri Kabinet Indonesia Bersatu



Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla, melantik para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Kamis 21 Oktober 2004 di Istana Negara, Jakarta. Sehari sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden pilihan rakyat secara langsung pertama kali ini dilantik dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat yang diadakan khusus untuk itu. Kabinet Indonesia Bersatu ini terdiri dari 36 menteri dan setingkat menteri. Berikut ini susunan dan profil ringkas para menteri Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004-2009 tersebut:



PRESIDEN

ersatu



PRESIDEN SBY DAN WAPRES JK FOTO BERSAMA DENGAN PARA MENTERI KIB SEUSAI PELANTIKAN DI ISTANA NEGARA, 21 OKTOBER 2004 ■ e-li/setneg



SBY DIDAMPINGI WAPRES JK MELANTIK MENTERI KIB ■ e-li/setneg



PRESIDEN SBY DAN WAPRES JK FOTO BERSAMA DENGAN PARA MENTERI KIB DAN KELUARGA ■ e-li/setneg

Susunan Kabinet Indonesia Bersatu

Presiden
SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Wakil Presiden
MUHAMMAD JUSUF KALLA

Menteri Koordinator
Menko Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan

WIDODO AS

Menko Bidang Perekonomian

ABURIZAL BAKRIE

Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat

PROF DR ALWI SHIHAB

Nenteri Negara Sekretaris Negara
YUSRIL IHZA MAHENDRA

Menteri yang Memimpin Departemen
Menteri Dalam Negeri

LETJEN TNI (PURN) M. MA'ARUF

Menteri Luar Negeri

HASSAN WIRAYUDA

Menteri Pertahanan

PROF. DR. JUWONO SUDARSONO

Menteri Hukum dan HAM

DR HAMID AWALUDIN

Menteri Keuangan

JUSUF ANWAR

Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral

PURNOMO YUSGIANTORO

Menteri Perindustrian

ANDUNG NITIMIHARDJA

Menteri Perdagangan

MARI E PANGESTU

Menteri Pertanian

ANTON APRIANTONO

Menteri Kehutanan

M.S. KABAN

Menteri Perhubungan

IR HATTA RADJASA

Menteri Kelautan dan Perikanan

FREDDY NUMBERI

Menteri Tenaga Kerja dan

Transmigrasi

FAHMI IDRIS

Menteri Pekerjaan Umum

DJOKO KIRMANTO

Menteri Kesehatan Masyarakat

SITI FADILAH SUPARI

Menteri Pendidikan Nasional
PROF DR BAMBANG SUDIBYO

Menteri Sosial

BACHTIAR CHAMSYAH

Menteri Agama

M MAFTUH BASYUNI

Menteri Negara

Menteri Negara Kebudayaan dan
Pariwisata

JERO WACIK

Menteri Negara Riset dan Teknologi

DR KUSMAYANTO KADIMAN

Menteri Negara Koperasi, Usaha
Kecil dan Menengah

SURYADHARMA ALI

Menteri Negara Komunikasi dan
Informasi

Dr. SOFYAN A. DJALIL

Menteri Negara Lingkungan Hidup

IR. RACHMAT WITOELAR

Menteri Negara Pemberdayaan

Perempuan

MEUTIA HATTA

Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara

TAUFIQ EFFENDI

Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala

Bappenas

DR SRI MULYANI INDRAMATI

Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara

SUGIHARTO

Menteri Negara Pemuda dan
Olahraga

ADYAKSA DAULT

Menteri Negara Percepatan
Pembangunan Daerah Tertinggal

SAIFULLAH YUSUF

Menteri Negara Perumahan Rakyat

M YUSUF ASHARI

Pejabat Berkedudukan Setingkat
Menteri

Jaksa Agung

ABDUL RAHMAN SALEH

Sekretaris Kabinet

SUDI SILALAH

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan

Widodo Adi Sucipto



Atasi Konflik & Teroris

Lama tidak tampil di depan publik, pensiunan Laksamana TNI-AL Widodo Adi Sucipto dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memegang pos Menko Politik, Hukum dan Keamanan. Prioritasnya menangani konflik dan terorisme. Prioritas lain, menyelamatkan sumber daya alam, komoditi hutan dan laut, dari pencurian.

Untuk meningkatkan koordinasi penanganan dan pemberantasan terorisme,

Widodo membentuk sebuah badan tingkat domestik yang akan mengatur langkah-langkah operasional, termasuk payung hukum dan pendayagunaan aparat intelijen. Juga dibutuhkan dukungan dari publik untuk mengatasi aksi-aksi teror.

Widodo lahir di Boyolali, Jawa Tengah, 1 Agustus 1944. Dia menamatkan AKABRI-AL tahun 1968. Satu-satunya Laksamana Angkatan Laut yang menjabat Panglima TNI (1999-2002).

Ketika menjabat Panglima TNI, Widodo melihat berkecamuknya konflik yang dipicu oleh perbedaan kepentingan antar kelompok. Kepentingan kelompok sangat mengemuka mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, tiada hari adu pendapat untuk tujuan memenangkan kelompok sendiri.

Untuk keluar dari krisis, kata Widodo, bangsa ini harus mempererat rasa kebersamaan. Dengan demikian tidak ada persoalan bangsa yang tidak bisa diselesaikan. Krisis tidak bisa diselesaikan dengan menyalakan terus dendam dan permusuhan.

Prioritas utama lainnya, meredam konflik bersenjata di Aceh, Poso dan Papua. Soal status darurat sipil sudah diperpanjang dan terus menerus dievaluasi agar diturunkan statusnya menjadi tertib sipil. Operasi militer hanya dilakukan di sisa-sisa basis militer Gerakan Separatis Aceh.

Soal terorisme, Widodo ingin mengubah paradigma bahwa aksi terus melekat dengan ummat Islam. Sesungguhnya, kata Widodo, Islam itu agama yang menjunjung perdamaian dan keselamatan ummat manusia, tanpa membedakan ummat dari agama dan bangsa apa pun.

Islam, kata Widodo, membawa misi keselamatan bagi seluruh alam. Membangkitkan sentimen agama hanya membuat bangsa ini terpuruk dan terpecah belah. Ummat beragama diminta tidak terpedaya oleh informasi yang tidak jelas kebenarannya. "Sekarang yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar," kata Widodo.

Menteri Koordinator Ekonomi

Aburizal Bakrie



Ekonomi Domestik

Arsitek ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu bukanlah ekonom pendidikan barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendobrak tradisi puluhan tahun, menunjuk praktisi bisnis Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Aburizal, lebih akrab dipanggil Ical, menduduki posisi kunci yang sebelumnya didominasi para ekonom tamatan Berkley

University, Amerika Serikat. Latar belakang pendidikan Ical hanyalah insinyur elektro tamatan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Ical yang lahir di Jakarta, 15 November 1946, meneruskan "kerajaan" bisnis Bakrie & Brothers yang diwariskan oleh ayahnya, H. Achmad Bakrie. Selain pengusaha, Ical giat di pelbagai organisasi di dalam maupun luar negeri. Setelah menjadi Menko Perekonomian,

prioritas utamanya, menggerakkan sektor riil yang tersendat-sendat sejak awal krisis ekonomi tahun 1997.

"Untuk menggerakkan sektor riil, pemerintah tidak lagi terlalu mengandalkan dana yang berasal dari anggaran. Dalam jangka panjang, pemerintah harus bisa memanfaatkan dana perbankan, Jamsostek, atau lainnya," kata Ical usai serah terima jabatan (21/10-2004).

Di tengah hujan protes, SBY bersikeras mengangkatnya selaku Menko Perkonomian lantaran Ical punya pemikiran yang nasionalis, akan mengembangkan potensi pasar domestik sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap penyelundupan yang merusak perekonomian dalam negeri. Sebab pemulihan perekonomian harus bertumpu pada pemberdayaan sumber daya ekonomi domestik.

Ketika bertemu SBY di Cikeas, Ical sudah siap dengan konsep pemulihan ekonomi. Dia menetapkan lima prioritas. Pertama, menghapus semua bentuk proteksi. Kedua, menetapkan strategi industri. Ketiga, pembangunan ekonomi domestik. Ini menyangkut pembangunan pasar, pelaku usaha, produksi, hingga pembiayaannya.

Prioritas keempat, membangun infrastruktur yang saat ini sudah sangat hancur. Berdasarkan studi yang dilakukan Kadin, diperlukan USD 150 miliar untuk membangun infrastruktur selama 10 tahun.

Prioritas kelima, kebijakan di bidang energi. Dalam jangka waktu enam bulan hingga satu tahun, kebijakan energi tersebut akan disusun lebih serius oleh pemerintah.

Ical pernah bertarung di dalam konvensi nasional Partai Golkar untuk seleksi calon presiden. Namun dia gagal. Selain pengusaha, Ical juga aktif di berbagai organisasi, seperti Ketua Umum KADIN (1995-2004), Presiden Asean Chamber of Commerce & Industry, anggota Dewan Pakar ICMI.

Dalam kehidupan pribadinya, Ical punya hobi menyanyi dan olahraga. Meskipun bisa menari cha-cha dan waltz, Ical tidak terlalu menikmatinya. Dia sangat gandrung menyanyi, terutama lagu-lagu yang romantis dan sentimental. Sedangkan untuk olahraga, sesibuk apapun Ical menyediakan waktu tiga jam setiap hari. Namun Ical sangat membenci rokok.

Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

Alwi Shihab



Politisi yang Elegan

Dalam pemerintahan Presiden KH Abdurahman, Alwi Shihab menjabat Menteri Luar Negeri, sedangkan Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya menduduki kursi Menko Polkam. Tetapi dalam kabinet Indonesia Bersatu, Susilo-lah yang mengangkat Alwi selaku Menko Kesra.

Pria kelahiran Rappang, Sulawesi Selatan, 19 Agustus 1946, ini sosok pemimpin yang simpatik, akomodatif, tenang dan cerdas. Alwi dikenal sebagai politisi PKB yang elegan dan kompromis. Meskipun diberhentikan dari jabatan Ketua Umum PKB bersama Saifullah Yusuf, juga duduk dalam kabinet SBY, Alwi tidak ingin menciptakan gejolak.

Tampil sebagai tokoh politik yang loyal, Alwi tak pernah berambisi mencalonkan diri selaku presiden, meskipun partainya meraih posisi ke tiga pada Pemilu legislatif, April 2004. Dia memberi jalan kepada mentornya, Wahid, akrab dipanggil Gus Dur. Namun Gus Dur terjegal oleh persyaratan KPU. Ambisinya bukan merebut kursi, tetapi membesarkan partai.

Karena bertanggungjawab bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, buat Alwi, pemulihan ekonomi mesti berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Karena hanya dengan cara itu, pergerakan ekonomi bisa dipacu. Caranya, memperkuat sektor usaha kecil dan menengah. Dia menunjuk Amerika dan Eropa, di mana 42

persen perekonomian didominasi oleh sektor usaha kecil dan menengah.

Terlalu banyak anggaran negara tersedot untuk melunasi utang. Karena itu Alwi menyarankan agar negara-negara kreditor diberitahu bahwa pemberdayaan perekonomian dalam negeri berdampak pada daya beli masyarakat. Pada gilirannya memberi manfaat bagi hasil industri negara-negara kreditor.

“Kita jangan dipaksa menerima utang untuk membayar utang. Ini artinya gali lobang tutup lobang,” kata Alwi.

Alwi pernah mengikuti pendidikan formal di University of Al-Azhar, Cairo, IAIN Alaudin, Makasar, University of Ain Shams, Cairo, Temple University, USA dan post doktorat Harvard University: The Center For the Study of Word Religious, USA. Dia juga pernah duduk sebagai eksekutif puncak berbagai perusahaan, seperti Glass Priangan Factory, Cianjur, Alfa Contracting Company, Jeddah,

PT. Prima Advera, dan pendiri Yayasan Darul Qur’an, Jakarta.

Doktor lulusan Temple University, AS, dan Ain Shams University, Kairo, ini menunjukkan karakternya sebagai politisi yang santun, tak menginginkan adanya konflik. Alwilah tokoh Islam pertama yang duduk dalam Board of Trustee pada Centre for the Study of World Religions. Sosoknya sebagai diplomat yang andal, teruji ketika dia menjadi Menteri Luar Negeri.

Menteri Sekretaris Negara

Yusril Izha Mahendra



Perjuangan Piagam Jakarta

Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang yang mantan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Kabinet Gotong-Royong dan Kabinet Persatuan, ini dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu. Maklum, PBB yang dipimpinya sejak awal sudah berkoalisi dengan Partai Demokrat mendukung pencalonan SBY-JK dalam Pemilu Presiden.

Jauh sebelum Pemilu 2004, nama pria kelahiran Belitung, Babel, 5 Februari 1956, ini sempat disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon presiden. Namun, kepada wartawan Tokoh Indonesia, ia menyatakan tidak berambisi jadi presiden, kecuali PBB bisa masuk tiga besar sebagai pemenang Pemilu. Di samping itu, ia menegaskan bahwa PBB akan terus memperjuangkan Piagam Jakarta secara demokratis dan konstitusional.

Penulis pidato Presiden Soeharto pada era pemerintahan Orde Baru, ini seorang terpelajar dan berpenampilan modis. Namun keberhasilannya tidak diraih dengan mudah. Saat pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, dia sempat tinggal dari masjid ke masjid selama kuliah di Universitas Indonesia (UI). Hidupnya sangat sulit. Untuk menyambung hidup, Yusril bekerja serabutan. Berbagai pekerjaan dilakoninya. Mulai memberi les ngaji hingga berjualan ikan di Pasar Tanah Abang.

Hidupnya mulai cerah ketika mulai akrab dengan Prof Usman, dosennya di UI yang juga tokoh Masyumi. Usman itulah yang menuntun Yusril untuk bergaul dan berguru kepada tokoh politik Masyumi. Termasuk, berkenalan dengan tokoh sentral Masyumi, Moh. Natsir, yang dikaguminya sejak kecil.

Pengalaman itu telah membuatnya kian matang. Setelah tujuh tahun kuliah di Fakultas Hukum UI, Yusril akhirnya meraih gelar sarjana pada 1983. Dia pun menjadi dosen di almamaternya itu. Bekerja sebagai dosen, memberinya peluang menempuh pendidikan pascasarjana. Dia meraih master di University of The Punjab, India (1984). Lalu gelar doktor diraih dari Universiti Sains Malaysia (1993).

Kemudian, pengalamannya menulis 204 naskah pidato Presiden Soeharto, telah menjadi bekal tersendiri baginya untuk memasuki

dunia politik. Saat reformasi bergulir dia dan rekan-rekan mendirikan Partai Bulan Bintang, yang mengantarkannya menjadi menteri.

Menteri Dalam Negeri

Mochamad Ma’ruf



Orang Dekat SBY

Meskipun merasa dekat dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Mochamad Ma’ruf tidak menduga diangkat jadi Menteri Dalam Negeri. Tetapi pensiunan jenderal itu, selaku ketua tim sukses, lebih banyak berperan memenangkan pasangan SBY-JK.

Dalam dialog dengan SBY, mereka hanya bertukar pikiran soal substansi, bagaimana membangun good government. SB tidak menanyakan kepada Ma’ruf masalah-masalah yang berkaitan dengan rencana

penempatannya.

Pria kelahiran Tegal, Jawa Tengah, 20 September 1942 ini, memang tidak punya pengalaman di pemerintahan. Karena itu, akan lebih banyak menyesuaikan diri dan mempelajari program apa yang sudah, sedang, dan akan dilaksanakan. Tentunya akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah yang baru.

Ma’ruf lebih banyak berkarir di militer. Tamatan AMN tahun 1962 ini, terakhir menjabat Kassospol ABRI tahun 1995. Lantas dia diangkat jadi Duta Besar RI untuk Vietnam tahun 1996.

Prioritasnya, mengelola pemilihan kepala daerah secara langsung dan masalah pemekaran wilayah yang masih menimbulkan konflik.

“Undang-Undang Pemerintahan Daerah kelihatan sudah sempurna, tetapi sosialisasi dan pemahaman tentang Pilkada masih memerlukan proses dan waktu,” kata Ma’ruf.

Kesadaran politik masyarakat semakin baik, tetapi masih ada peluang konflik horizontal. Dia berharap Pilkada langsung berjalan aman, tertib, dan lancar. Sebab rakyat sudah belajar dari berbagai pemilihan umum sebelumnya, terutama Pemilu legislatif dan presiden tahun 2004 yang berjalan aman, lancar dan tertib.

Pilkada langsung dimulai tahun 2005, kata, Ma’ruf, diharapkan berjalan seperti Pemilu yang lalu. Karena itu, peraturan pemerintah yang mengatur Pilkada harus segera diselesaikan dan disosialisasikan.

Menurut Ma’ruf, soal pemekaran wilayah di beberapa daerah mesti ada pendekatan yang lebih baik lagi dengan masyarakat. Sebab pada dasarnya, masyarakat belum mengerti betul hakikat otonomi daerah. Jika ingin ada pemekaran daerah, perlu ada penjelasan yang sejelas-jelasnya.

Menteri Luar Negeri

Hassan Wirayudha



Membuka Pintu Investasi

Citra buruk korupsi, krisis ekonomi dan terorisme, mencoreng wajah Indonesia di panggung diplomasi internasional. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat menyadarinya, tetapi dia tetap memilih Hassan Wirayudha untuk memimpin departemen luar negeri.

SBY dan Hassan duduk bersama sebagai menteri di dalam kabinet Presiden Megawati.

Keduanya menangani urusan diplomasi menyangkut gerakan separatis Aceh. Soalnya, mantan Presiden KH

Abdurahman Wahid mengangkat masalah itu ke forum internasional. Pria kelahiran Tangerang, Banten, (9 Juli 1948) ini meraih sarjana hukum di UI, master hukum di Harvard School of Law, Cambridge dan doktor hukum internasional di Virginia School of Law, AS. Hassan seorang diplomat karir dengan jabatan tertinggi Dirjen Politik Deplu sebelum diangkat menjadi Menlu pada kabinet Gotong Royong (2001-2004).

Hassan berjanji memberikan prioritas pada kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif, terutama dalam upaya memulihkan citra dan kepercayaan dunia luar terhadap Indonesia. Soalnya, Indonesia tercatat sebagai negara terkorup di Asia dan negara terkorup ketiga di dunia. Di tengah citra buruk itu, Hassan berupaya keras membuka pintu investasi luar negeri bagi Indonesia untuk membantu upaya pemulihan ekonomi.

Belajar dari pengalaman pahit Timor Timur, pekerjaan tersulit Hassan adalah mencegah para separatis masuk ke forum-forum internasional. Dia berupaya menekan dukungan dan bantuan internasional kepada kelompok separatis, mempersempit ruang gerak diplomasi bagi kelompok separatis Aceh, Ambon dan Irian Jaya.

Menteri Pertahanan

Juwono Sudarsono



Menteri Empat Presiden

Tenang dan low profile, itulah pembawaan Prof. Dr. Juwono Sudarsono yang dipilih Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Menteri Pertahanan. Juwono juga pernah duduk di kursi menteri semasa pemerintahan Presiden Soeharto, B.J. Habibie dan KH Abdurahman Wahid.

Semasa pemerintahan Pak Harto, Juwono menjabat Meneg Lingkungan Hidup, Menteri Pendidikan Nasional dalam kabinet Habibie dan

Menteri Pertahanan di pemerintahan Wahid alias Gus Dur, kemudian ditunjuk Presiden Megawati selaku Dubes RI di Inggris. SBY memanggil Juwono yang masih menjabat Dubes ke Cikeas, membicarakan berbagai masalah tentang pertahanan.

Pria kelahiran Ciamis, 5 Maret 1942 ini, guru besar pada FISIP-UI, meraih gelar doktor dari London School of Economics and Political Science, Inggris, dan Georgetown University, AS. Dia juga master dari School of Social Sciences, Negeri Belanda.

Juwono, pakar di bidang pertahanan karena dia orang lama di Lembaga Pertahanan Nasional, menjabat sebagai wakil gubernur. Gus Durlah yang mendobrak tradisi puluhan tahun dengan Juwono yang tidak berlatar belakang militer sebagai orang nomor satu di Dephan. Ayahnya, mendiang Dr. Sudarsono, termasuk salah seorang pendiri republik. Namun Juwono tak pernah memanfaatkan kehebatan ayahnya.

Kepada SBY, Juwono memaparkan posisi Indonesia dalam kerangka pertahanan di Asia Tenggara, termasuk rencana pembentukan ASEAN Security Community dan ASEAN Economic Community, hasil dari KTT ASEAN tahun 2003. Dalam soal pertahanan, selain sesama anggota ASEAN, Indonesia perlu membangun kerjasama pertahanan yang lebih intensif dengan Papua Nugini, Australia dan Timor Leste.

Juwono ingin mendukung kebutuhan TNI dan Polri dengan anggaran, idealnya Rp 44 triliun sampai Rp 46 triliun setahun. Namun sejak awal kemerdekaan hingga sekarang, anggaran untuk TNI dan Polri tidak pernah mencukupi kebutuhan minimal sekalipun.

Menurut Juwono, sejak tahun 1952 sampai sekarang masih dicari-cari jalan untuk mencukupi kedua lembaga bersenjata itu dengan anggaran resmi. Akhirnya kebutuhan mereka didukung oleh berbagai unit kesatuan usaha, koperasi, atau yayasan untuk

menopang pelaksanaan tugas operasional komando taktis maupun komando utama.

Program pemerintah, mencakup perdamaian, kesejahteraan, keadilan, dan konsolidasi demokrasi, menugaskan Dephan untuk mendukung kebutuhan TNI agar para prajurit mendapat kepemimpinan, perlengkapan, alat-alat dan latihan yang memadai sesuai kemampuan anggaran negara. Di tengah keterbatasan anggaran, untuk menjaga pertahanan negara seluas Indonesia, banyak hal yang harus diperbaiki.

Soal embargo senjata, Juwono menjelaskan Inggris mencabut embargo, Februari 2002, tetapi meminta penggunaan persenjataan buatan Inggris dibatasi.

Sedangkan embargo senjata oleh pemerintah Amerika sedang dalam pembahasan.

"Tetapi kita tidak akan pernah meminta-minta bantuan. Kita akan menjelaskan secepat mungkin. Kalau diizinkan oleh presiden, rencana itu dilaksanakan bulan depan atau awal tahun depan," kata Juwono.

Menteri Hukum dan HAM

Hamid Awaludin



Tinggalkan Kenangan Manis

Ketukan romantik Hamid Awaludin tak akan terdengar lagi oleh rekan kerjanya di KPU, Valina Singka. Hamid dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menteri Kehakiman dan HAM.

Bagi Hamid bekerja di KPU menyimpan banyak kenangan manis. Dia merasa ada suatu yang hilang dalam dirinya. Hamid seringkali mencairkan rapat-rapat KPU yang panas dan

tegang dengan canda dan leluconnya. Pada pekan pertama menjabat menteri, Hamid seakan belum siap meninggalkan kantor KPU. Karena punya hobi melawak, Hamid akrab dengan semua orang, termasuk wartawan.

Logat Makasar yang kental, membedakan Hamid dengan anggota KPU lainnya. Hamid buka kartu, di depan wartawan memasang wajah serius, padahal dia berbohong lantaran tidak tahu pokok permasalahan.

Belum berapa lama duduk di kursi menteri, Hamid suatu malam memimpin penggrebekan wanita asing pekerja sek. Para PSK itu digiring keluar dari tempat hiburan karena menyelewengkan izin berkunjung (visa) yang dipegangnya. Hamid mencemaskan meluasnya praktik pelacuran dan penyelundupan Narkoba yang bermula dari penyalahgunaan visa. Sebenarnya sumber penyalahgunaan itu ada di Direktorat Jendral Imigrasi dan Kedubes RI di luar negeri.

Dia akan terus merazia penjara-penjara yang menjadi pusat peredaran Narkoba secara terselubung. Sasaran pertamanya LP Cipinang. Tak lama setelah kembali dari studi di Amerika, Hamid melakukan penelitian di LP Cipinang. Dia mempublikasikan hasil penelitiannya tahun 1996. Di dalam penelitian tersebut, Hamid menemukan sekelompok narapidana abal-abal, mereka yang memilih tinggal seumur hidup di penjara.

Pria kelahiran Pare-Pare, Sulawesi Selatan, (5 Oktober 1960) ini, tamat dari fakultas hukum Unhas tahun 1986, merantau ke AS. Semula dia mengambil program non degree bidang jurnalistik. Kemudian mengambil dua program master sekaligus di American University, yakni master Hukum Internasional dan HAM serta Politik Internasional. Di kampus yang sama, dia berhasil menyelesaikan program doktornya. Hamid sempat menjadi Sekretaris Eksekutif Kantor Pengacara International SAA. Sekarang Hamid masih mengajar dan menjabat Direktur Pusat Studi HAM Unhas.

Bagi Hamid tak ada kompromi dengan tindak pidana korupsi. Ini

persoalan persoalan serius yang harus diperangi. Karena itu dia berencana membuang para koruptor kakap ke LP Nusa Kambangan. Hamid punya jejak rekor panjang di bidang pemberantasan korupsi, anggota Tim Pemberantasan Korupsi dan anggota Tim Gabungan Pemberantasan Korupsi, penasihat khusus pemberantasan korupsi pada Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Hamid memiliki kekayaan sebuah Ruko di Palembang, Pondok Kelapa, Jakarta, dan sebuah rumah di Makasar. Dia juga punya sedan pribadi Toyota Altis senilai Rp 180 juta dan sebuah mobil Kijang seharga Rp 110 juta yang dikendarai istrinya yang bekerja di sebuah bank. Tabungannya di Citibank sejumlah 3.000 dolar AS (Rp 27 juta) dan tabungannya di BNI sebesar Rp 100 juta.

Selebihnya, selain perabot rumah tangga, keluarga Hamid tidak memiliki kekayaan lain.

Menteri Keuangan

Jusuf Anwar



Perbesar Sumber Penerimaan

Jusuf Anwar bukan orang baru di Departemen Keuangan. Karena itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai menteri di pos strategis tersebut. Dia menyisihkan nama yang sudah merebak, Prof. Irzan Tandjung dari Partai Demokrat.

Jusuf pernah menjabat sekretaris jenderal Depkeu dan Ketua Bapepam. Jadi pilihan SBY tidak meleset. Tugas terberatnya mengatasi defisit APBN. Jusuf juga dihadang selangit utang dalam dan luar negeri. Tekadnya yang membara, memperbanyak sumber-sumber penerimaan negara.

Master bidang ekonomi Vanderbilt University, AS ini, lahir di Tasikmalaya, Jabar, 2 Januari 1941. Jusuf juga Kepala Balai Pendidikan dan Latihan Keuangan, dan Dirut PT. Danareksa.

Dalam pandangan Jusuf APBN menanggung beban berat lantaran defisit dan langkanya sumber-sumber penerimaan negara. Untuk itu perlu perluasan sumber pemasukan. Dia akan menjaga agar pengeluaran negara tidak lebih besar pasak daripada tiang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi.

Sejumlah langkah strategis segera diambil Jusuf dalam pengelolaan utang luar negeri untuk mengurangi beban dan ketergantungan pada utang luar negeri. Termasuk, memperbesar jumlah pertukaran utang dengan program kegiatan, pengembalian utang yang belum dan tidak digunakan pemerintah, mendesak pengembalian commitment fee atas pinjaman yang belum dipakai.

Apakah pemerintah perlu meminta pengampunan utang luar negeri yang dikorupsi pejabat Indonesia di masa lalu? Jusuf menjawab: "Banyak orang bernyanyi soal utang yang dikorupsi. Jumlahnya 30-40 persen dari pinjaman. Tetapi, tidak ada satu pun yang bisa dibuktikan."

Jusuf, sejak 1990 sudah berpengalaman menangani utang-piutang swasta. "Kita tidak pernah melihat uangnya. Ditender secara internasional. Pembayaran langsung ke penyalur. Jadi, tidak mungkin bocor," kata Jusuf.

Menteri ESDM

Purnomo Yusgiantoro

Berani Bertindak Tidak Populis

Reputasi Purnomo di kalangan perminyakan dunia tak diragukan lagi. Dialah satu-satunya yang dipercaya organisasi negara-negara pengeksplor minyak untuk menjabat rangkap Presiden dan Sekjen



OPEC. Jadi tidak salah jika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menahannya di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Purnomo, satu-satunya menteri yang bertahan di departemen yang sama dalam pemerintahan tiga presiden, KH Abdurrahman Wahid, Megawati dan SBY. Pria yang menyandang empat gelar ini (dokter, insinyur dan dua master), lahir di Semarang, 16 Juni 1951.

Selama menjabat menteri sejak tahun 2000, Purnomo berkali-kali mengambil kebijakan tidak populis, menaikkan harga BBM secara bertahap. Agaknya, dalam pemerintahan SBY, Purnomo harus kembali mengambil langkah tersebut lantaran melonjaknya harga minyak di pasar internasional, pernah menyentuh angka USD 50 dolar per barel.

Purnomo condong menyesuaikan harga BBM dalam negeri dengan standar harga internasional. Tak kurang dari 10 kali dia juga menyesuaikan tarif dasar listrik (TDL). Soalnya, dia lebih setuju jika subsidi puluhan triliun rupiah yang membenani anggaran negara, dialihkan ke program-program bantuan langsung bagi masyarakat tidak mampu.

Langkah Purnomo mengusulkan kenaikan harga BBM dan TDL secara bertahap awalnya menuai protes keras dari masyarakat. Pemerintah pun mengalah, sempat menurunkan harga beberapa jenis BBM. Megawati ketika menjabat presiden, mengaku merasa berat setiap kali harus menandatangani Keppres kenaikan harga BBM dan TDL.

Di dalam negeri Purnomo memang sering dicela karena mengambil langkah tidak populis. Tetapi di antara negara-negara anggota OPEC, dia malahan dihormati. Dialah pertama kali dalam sejarah OPEC dipercaya memegang kedua jabatan penting tersebut.

Program Purnomo tiga bulan ke depan, mendongkrak produksi minyak mentah dari 966.465 barel menjadi 1 juta barel per hari, mendekati target APBN, 1,072 juta barel per hari. Insinyur Teknik Perminyakan ITB ini, juga akan menggenjot produksi gas bumi di atas 8 miliar kaki kubik per hari.

Migas diharapkan tetap menempati posisi kunci, memasukkan 30 persen dari total pendapatan negara. Karena itu sektor Migas memerlukan investasi baru. Belakangan, rendahnya minat investasi di sektor mengakibatkan merosotnya produksi nasional.

Rencana penting lain Purnomo, terus membenahi perusahaan-perusahaan negara di bawah departemennya agar terlepas dari budaya KKN, juga memantapkan otonomi daerah di sektor pertambangan.

Menteri Perindustrian

Andung A. Nitimiharja

Kembalikan Surga Investasi



Pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk jabatan menteri perindustrian jatuh pada Andung Nitimiharja. Keputusan yang mengejutkan itu dilakukan tengah malam menjelang pengumuman susunan anggota kabinet Indonesia Bersatu (21/10-2004). Nama yang santer disebut sebelumnya adalah Sugiharto, Direktur Keuangan Medco Energy.

SBY mengembalikan departemen perindustrian dan perdagangan pada posisi semula, yaitu dua departemen yang terpisah.

Andung tak pernah berangan-angan menjadi menteri. Dia pun terkejut ketika dipercayakan SBY menjadi Menteri Perindustrian di dalam kabinet Indonesia Bersatu. Namun ketika menjabat Deputy Kepala

BPKM, Andung sering berhubungan dengan para investor, departemen perindustrian dan pengusaha.

Pria kelahiran Bandung, 4 April 1950, ini meraih gelar doktor bidang Studi Pembangunan, Pittsburg University, USA. Dia juga sarjana lulusan IPB. Obsesinya mengembalikan surga investasi di Indonesia. Jejak karir Andung adalah Deputy Kepala BKPM Bidang Pengembangan Usaha Nasional, Staf Ahli Meneg Pembinaan BUMN Bidang Investasi dan Otonomi Daerah BUMN, Komisariss Utama PT. PLN Oktober, PT. Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT. Asuransi Jasa Raharja.

Tugas utama Andung tentu membangkitkan kembali sektor industri dari tidur panjang. Dia ingin merebut hati para investor (dalam dan luar negeri) dengan merombak sejumlah peraturan yang menghambat investasi dan industri. Tugas lainnya, menjaga investasi yang sudah ada agar tidak hengkang ke negara-negara lain.

“Investasi tidak membedakan negara, mengalir seperti air, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Negara manapun bisa jadi lahan investasi asalkan memberi profit dengan risiko yang terukur,” kata Andung.

Langkah pertamanya, melakukan dialog dengan para anggota asosiasi dan investor asing untuk memperoleh masukan sebagai landasan kebijakan bagi pengembangan investasi. Andung menemukan titik harapan karena keadaan ekonomi makro dan keamanan yang membaik.

Andung bertekad memperkuat struktur industri dari hulu ke hilir. Proses produksi harus berlangsung di dalam negeri, terutama bagi barang-barang fabrikasi yang berbasis sumber daya alam. Yang mendapat prioritas pengembangan adalah industri berbasis pertanian, industri padat karya dan transportasi. Cetak biru jangka pendeknya sudah disiapkan.

Dalam hal pengembangan industri pertanian dari hulu sampai hilir, Andung akan bekerjasama dengan Departemen Pertanian. Sedangkan soal penyelarasan tarif produk industri agro di sektor hulu dan hilir akan dibahas bersama untuk mendapatkan formula tarif yang pas. Maksudnya supaya industri punya daya saing, tarif bea masuk produk di sektor hulu tidak lebih besar daripada di sektor hilir.

Industri di bidang transportasi, seperti otomotif dan galangan kapal, masuk daftar prioritas karena akan mendorong pertumbuhan industri pendukung, misalnya industri komponen (suku cadang).

Di sektor industri manufaktur, departemen perindustrian tetap memperhatikan program padat karya, seperti industri tekstil dan produk tekstil, alas kaki, dan elektronik. Industri-industri ini masih punya potensi ekspor.

Menteri Perdagangan

Mari Elka Pangestu



Memacu Kembali Ekspor

Boleh jadi jabatan menteri merupakan hadiah ulang tahun bagi Mari Pangestu. Meskipun menuai protes, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (21/10) tetap mengangkatnya selaku Menteri Perdagangan. Mantan direktur eksekutif CSIS itu ekonom perempuan yang sudah mendunia. Mari seringkali memberi masukan kepada IMF, Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Dosen FE-UI ini menempuh pendidikan di Australia mulai tingkat SLTA sampai memperoleh gelar master. Perempuan kelahiran Jakarta (23 Oktober 1956) ini, meraih gelar master dalam bidang Microeconomics, Macroeconomics, International Trade, Economic Development & Accounting dari Australian National University, Canberra (1980). Gelar doktor di bidang International Trade, Finance & Monetary, diperolehnya dari University of California, AS (1986).

Mari menulis banyak buku, dan artikel tentang ekonomi dan perdagangan, dimuat dalam surat kabar dalam dan luar negeri. Tahun 1990, dia melepas jabatannya di CSIS karena pindah ke Houston, Texas, AS. Soal kedudukannya di CSIS yang menjadi pembuat kebijakan Orde baru, Mari mengakui pada awalnya memang benar. Saai itu, CSIS dipimpin oleh mendiang Ali Murtopo dan Sudjono Humardani serta beberapa orang yang duduk di pemerintahan Presiden Soeharto.

Sejak awal tahun 1980-an, CSIS dijaui Pak Harto karena mengeritik pemerintahannya secara terbuka. CSIS merupakan kumpulan para pemikir yang menghendaki terbentuknya masyarakat sipil, sangat berbeda dengan misi awalnya yang mendukung Dwi Fungsi militer.

Mari ingin membenah perdagangan luar negeri Indonesia yang terpuruk dengan memberi tekanan kepada empat hal; penghapusan ekonomi biaya tinggi, menarik investasi, memperbaiki infrastruktur dan memperluas akses pasar ekspor. “Strategi jangka pendek dan menengah, menekan biaya tinggi,” kata Mari.

Ekonomi biaya tinggi melemahkan daya saing produk domestik di pasar internasional. Penyebabnya, rendahnya upah minimum regional yang berdampak pada kualitas dan tingkat produktivitas. Ditambah oleh ketentuan perpajakan, penyelundupan, pungutan di daerah dan pungutan liar.

Mari meminta para pengusaha bersama-sama pemerintah terus melakukan promosi dan memperluas akses pasar ekspor. Indonesia harus ikut serta dalam setiap perjanjian atau kesepakatan bilateral dan multilateral di bidang perdagangan. Bank-bank juga terus didorong agar mampu melaksanakan fungsi intermediasinya.

Langkah awal Mari membenah perdagangan, mendatangi pasar-pasar tradisional di berbagai tempat. Yang penting bagi rakyat kecil harga barang-barang kebutuhan pokok tidak melonjak.

Menteri Pertanian

Anton Apriantono



Angkat Pendapatan Petani

Usianya masih tergolong muda, 45 tahun. Sebelum nama-nama menteri diumumkan, Anton sudah santer masuk bursa kabinet Indonesia Bersatu.

Pria kelahiran Serang, Banten, ini staf pengajar IPB, tempat Presiden Susilo Bambang Yudhono menempuh program doktor. Dia meraih gelar doktor kimia pangan, Reading University, Inggris.

Anton mencatat sejumlah isu penting pembangunan pertanian selama lima tahun ke depan. Misalnya, konversi lahan pertanian ke nonpertanian yang semakin cepat dan meluas, ancaman produk impor, wabah penyakit tanaman dan hewan, swasembada pangan, serta konflik kepentingan antara pusat dan daerah.

Baginya membangun sektor pertanian adalah menyejahterakan para petani. Dengan demikian, sektor pertanian tidak semata-mata mengejar peningkatan produksi, tetapi yang lebih penting, memperbaiki pendapatan dan kesejahteraan petani. Anton membutuhkan koordinasi dengan menteri-menteri terkait agar alokasi APBN buat sektor pertanian dapat ditingkatkan.

“Karenanya perlu perubahan penting agar pembangunan pertanian berpusat pada unsur manusianya,” kata Anton.

Karena itu, dalam kaitan perdagangan luar negeri, pemerintah harus tetap memegang prinsip melindungi petani. Soalnya, menurut Anton, pertanian bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi juga berperan dalam pengentasan kemiskinan, kelestarian lingkungan dan pembangunan pedesaan.

Tentu perlu ada kebijakan khusus untuk melindungi para petani.

Kata Anton: "Kita perlu mencegah liberalisasi perdagangan dunia yang terlampau cepat yang merugikan negara-negara berkembang." Ini tentu barikade yang tidak mudah diterobos.

Bentuk perlindungan kepada petani dalam negeri, misalnya bea masuk bagi komoditi yang mengancam produk pertanian domestik. Tentang masalah ini perlu ada koordinasi dengan instansi teknis. Soal penetapan harga komoditas pertanian memang diserahkan kepada mekanisme pasar, tetapi pemerintah perlu melakukan intervensi bilamana hasil panen melimpah.

Sebagai bagian dari pemerintah dan pembangunan yang menyeluruh, departemen pertanian hanya akan bergerak dalam hal-hal yang sifatnya dibutuhkan oleh semua orang, misalnya hubungan lintas daerah dan antar-negara. Utamanya, mencegah kemungkinan yang merugikan konsumen serta pembangunan infrastruktur strategis.

Anton meyakini perubahan harus dilakukan terus-menerus untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terus berubah.

Menteri Kehutanan

MS Kaban



Ringkus Cukong Kayu Curian

Siapa sangka MS Kaban dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki kursi Menteri Kehutanan. Departemen "basah" itu sedang diguncang kasus pencurian dan penyelundupan kayu gelondongan.

Nasib Kaban memang sedang mujur karena pos tersebut diincar banyak partai, terutama Partai Demokrat. Malah SBY

menjatuhkan pilihan pada Sekjen PBB. Kaban yang meraih gelar master dari IPB, lahir di Binjai, Sumatra Utara, 5 Agustus 1958.

Prioritas utama Kaban, menghentikan pencurian kayu yang merajalela. Karena itu dia butuh kerjasama dari pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Kalau itu bisa dilakukan tak perlu ada Perpu (peraturan pemerintah pengganti UU).

Dia berjanji membereskan penyimpangan pengelolaan kehutanan dan menindak aparatnya yang terbukti menyimpang. Konsolidasi internal dan eksternal segera dilakukan Kaban dengan para petinggi Kehutanan, pengusaha hutan dan LSM. Hanya setelah itu dia mengeluarkan kebijakan baru untuk mengoreksi kebijakan sebelumnya.

Kaban ingin mengembalikan kejayaan industri kehutanan yang pernah menjadi sumber utama penghasil devisa sampai 9 miliar dolar setahun. Industri ini bakal kembali jadi sumber pemasukan negara. Namun dia tidak ingin mengabaikan pemulihan lahan-lahan hutan kritis.

"Ke depan perlu dilakukan restrukturisasi teknologi industri kehutanan untuk meningkatkan daya saing produk kehutanan," kata Kaban.

Targetnya dalam lima tahun mendatang, menyukseskan program pemberantasan penebangan liar, rehabilitasi hutan, revitalisasi industri kehutanan, dan pengembangan ekonomi masyarakat di sekitar hutan.

Empat target tersebut merupakan kunci perbaikan pengelolaan hutan ke depan. Fokus utama menghentikan penebangan liar yang jadi sumber penyelundupan kayu.

Kaban tidak main-main. Sehari setelah menjabat, dia mengadakan rapat pimpinan Departemen Kehutanan. Di situlah dia mencanangkan empat target sukses. Sebenarnya Kaban melanjutkan dan mendayagunakan program yang telah dilaksanakan pendahulunya, M. Prakosa.

Selisih yang jauh antara data ekspor Indonesia dan impor China merupakan bukti adanya ekspor ilegal kayu gelondongan. Misalnya, tahun 2000 China mencatat impor kayu dari Indonesia 931.000 meter

kubik, sementara angka dimiliki Indonesia hanya mengekspor 20.500. Angka tahun 2001, memperlihatkan selisih yang jauh lebih tinggi, 121.000 meter kubik berbanding 1,379 juta meter kubik.

Kaban sudah mengantongi nama-nama cukong yang terlibat dalam penebangan kayu ilegal untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung. Nama-nama mereka akan diumumkan setelah datanya meyakinkan.

Menteri Perhubungan

Hatta Rajasa



Cemaskan Melemahnya SDM

Menristek Hatta Rajasa menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mendudukkannya kembali selaku Menteri Perhubungan dalam kabinet Indonesia Bersatu. Hatta yang punya posisi penting di PAN, habis-habisan mendukung barisan SBY di Koalisi Kerakyatan, menghadang laju Koalisi Kebangsaan.

Semula insinyur teknik perminyakan ITB itu lebih memilih menjadi pengusaha. Dia memimpin

sejumlah perusahaan, tetapi semuanya dijual setelah terjun ke panggung politik praktis. Posisinya di PAN sangat strategis, menjadi sekretaris jenderal. Hatta sosok pekerja keras, jujur dan mandiri.

Tempaan kehidupan yang pas-pasan semasa kecil, Hatta harus berjuang keras untuk menamatkan studinya di ITB. Ayahnya seorang asisten wedana di Muarakuang, 100 kilometer dari Palembang, yang memiliki 12 orang anak. Ketika melanjutkan pendidikan SLTP di Palembang, dia menumpang di rumah pamannya. Pagi sekali dia sudah mengisi bak kamar mandi serta melakukan pekerjaan rumah lainnya, sebelum mengayuh sepeda menuju sekolah.

Ada tiga persoalan besar yang menjadi fokus perhatian pria berambut perak kelahiran Palembang, 18 Desember 1953 ini. Pertama, kemiskinan yang meningkat secara tajam dari 17 juta menjadi 40 juta jiwa, akibat kemiskinan struktural dan gelombang krisis yang berkepanjangan. Dia mencemaskan lemahnya SDM generasi baru yang didera oleh kekurangan nutrisi.

Kedua, menurunnya semangat toleransi, menonjolnya sikap keakuan. Sikap menonjol dalam konteks hukum, agama dan kelompok. Semangat kebersamaan merosot tajam, mengakibatkan terdesaknya kelompok masyarakat miskin yang tidak berdaya.

Ketiga, mengganasnya tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Karena itu, menurut Hatta, bangsa ini membutuhkan resep tepat yang mampu membangkitkan kembali semangat kebersamaan dan nasionalisme.

Perkembangan kemampuan emosionalnya banyak dipengaruhi oleh lingkungannya sewaktu kecil, remaja dan mahasiswa. Setiap orang harus saling menolong, saling memberi dan mau berkorban bagi orang lain. Dia sadar bahwa kesuksesan seseorang bukan semata-mata karena kemampuannya sendiri, tetapi sebagian besar karena dukungan dan jasa orang lain, terutama orang tua, keluarga dan teman sejawat.

Hatta pernah menjadi anggota DPR dan MPR, masuk dalam penilaian wartawan sebagai 10 tokoh DPR terbaik. Dia Pernah menjabat Ketua Fraksi Reformasi dalam masa peralihan di bawah tiga presiden, B.J. Habibie, KH Abdurahman Wahid dan Megawati.

Ketika menjabat Menristek dalam pemerintahan Presiden Megawati, Hatta terpilih menjadi Presiden Ke-46 Konferensi IAEA (The International Atomic Energy Agency). Hatta mengatakan dengan pengetahuan teknologi nuklir, Indonesia bisa memainkan peranan yang signifikan dalam pergaulan internasional. "Bangsa ini terlalu besar untuk diremehkan oranglain," kata Hatta.

Selama di PAN, dia tetap menjadi politisi garis tengah, tidak terseret ke kiri atau ke kanan. Garis politiknya pluralis, lintas agama dan budaya. Kemampuannya melobi cukup prima. Karena itulah Hatta

mampu melebur PAN, PPP, PKS dan Demokrat di dalam Koalisi Kerakyatan. Mungkin kemampuan inilah yang menarik perhatian SBY.

Menteri Kelautan dan Perikanan

Freddy Numberi



Kembali ke Negara Bahari

Satu dari dua duta besar yang dipanggil pulang untuk menjabat menteri adalah Freddy Numberi, sedang memimpin Kedubes RI di Roma, Italia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk pensiunan Laksda TNI-AL itu menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Freddy berpengalaman sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam pemerintahan Presiden KH Abdurrahman

Wahid.

Freddy, lahir di Serui, 15 Oktober 1947, setamat SMA masuk AKABRI tahun 1968. Lantas mengambil jurusan khusus AAL di Surabaya sampai lulus tahun 1971. Tekadnya yang membara, mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara bahari. "Ini telah menjadi komitmen dan tekad saya," kata Freddy.

Berkarir di TNI-AL, Freddy pernah dipercaya menjadi Komandan KRI Sembilan di kawasan Indonesia Timur, Komandan Satuan Tugas Proyek Pengadaan Kapal Parchim, Frosch, dan Kondor (1995 - 1996). Puncak karirnya di TNI-AL menjabat Komandan Pangkalan Utama TNI AL V Irian Jaya-Maluku, sebelum dipilih menjadi Gubernur Irija, April 1998. Lantas diangkat jadi Menpan tahun 2000-2001.

Tekadnya yang lain, mengangkat kehidupan para nelayan dengan memberi pinjaman lunak. Dia juga akan memberi perhatian pada budidaya perikanan dan mengandalikan penangkapan ikan ilegal oleh kapal-kapal asing.

Menurutnya, langkah tersebut penting sebab potensi perikanan tangkap terbatas, tetapi yang tergarap sudah mencapai 65 persen. Sebaliknya, perikanan budidaya memiliki potensi yang besar dengan komoditas yang dapat dikembangkan hingga mencapai puluhan jenis, tetapi belum tergarap optimal.

"Banyak negara telah membuktikan keandalan usaha budidaya. Masyarakat pesisir selatan Italia dan Perancis, semula wilayah miskin. Namun menjadi kawasan sejahtera berkat usaha budidaya," kata Freddy.

Freddy berjanji memajukan pembangunan kelautan dan perikanan. Merasa bukan yang terbaik, Freddy akan bekerja keras untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan. Targetnya mensejahterakan nelayan, masyarakat pesisir dan pebudidaya ikan.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Fahmi Idris



Kembali ke Kandang

Ibarat rusa yang dilepas kembali ke hutan, demikianlah kemujuran yang tertera pada garis tangan Fahmi Idris ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkatnya sebagai Menteri Tenaga Kerja. Fahmi pernah menempati jabatan itu dalam pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Belum lama menduduki kursinya, Fahmi disibukkan oleh pemulangan ratusan ribu TKI ilegal di Malaysia.

Cita-cita pria berdarah Minang kelahiran Jakarta (20 September 1943) ini, sebenarnya menjadi tentara. Dia terobsesi oleh kehebatan Jenderal De Gaulle. Tetapi nasib menentukan lain. Dia malah menjadi pengusaha dan politisi. Fahmi baru saja dipecat dari jabatan ketua

Partai Golkar ketika SBY menunjuknya sebagai Menaker. Memang sebelumnya Fahmi menentang dukungan Golkar terhadap pasangan Mega-Hasyim setelah calonnya sendiri, Wiranto, kalah.

Kuliahnya di FE-UI terbengkalai lantaran Fahmi sibuk menjadi aktivis, Ketua Laskar Arief Rachman Hakim, menjelang dan sesudah kejatuhan Presiden Soekarno tahun 1966. Namun akhirnya dia bisa menyelesaikan kuliah dan meraih gelar sarjana ekonomi.

Awalnya Fahmi tidak tertarik terjun ke politik praktis untuk mengikuti jejak rekan-rekannya seangkatan (66), seperti Cosmas Batubara dan David Napitupulu. Dia malah masuk kelompok delapan bersama Sugeng Sarjadi, Ponco Sutowo dan Aburizal Bakrie mendirikan PT Kodel tahun 1969. Lantas Fahmi memimpin puluhan perusahaan yang bergerak di berbagai bidang.

Fahmi memang suka sekali membikin kejutan. Bekas tokoh HMI ini bersama sejumlah tokoh eksponen 66 lainnya, 3 Maret 1984, menandatangani pernyataan masuk Golkar di depan pucuk pimpinan Golkar waktu itu, Sudharmono. Sejak itu Fahmi malang melintang di panggung politik praktis.

Selain pemulangan TKI, masalah fundamental yang mesti ditangani Fahmi, menciptakan lapangan kerja bagi lebih dari 40 juta penganggur. Dia juga akan mempelajari Undang-Undang Ketenagakerjaan (No 13/2003) yang menuai banyak protes dari para pekerja karena dinilai terlalu memihak kepentingan dunia usaha.

Untuk menangani pemulangan sekitar 700.000 TKI ilegal, Fahmi segera membentuk tim khusus. Pekerjaan ini menjadi salah satu prioritas departemennya. "Masalah ini dibicarakan ketika saya dipanggil Pak Susilo," kata Fahmi.

Menteri Pekerjaan Umum

Djoko Kirmanto



Mengangkat Kapal Karam

Berangkat dari pegawai harian, Djoko Kirmanto menapak anak tangga tertinggi tatkala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Awal karirnya dimulai sebagai site engineer pembangunan jembatan Karang Semut, Yogyakarta.

Djoko juga mengemban tugas mengangkat kapal karam, karena departemen PU

dihidupkan kembali setelah terdampar sejak tahun 2001. Para karyawan menyambut kelahirannya kembali. Tadinya fungsinya digantikan oleh departemen pemukiman dan prasarana (pengembangan) wilayah di mana Djoko pernah menjabat sekretaris jenderal. Sebelum dibubarkan, DPU membawahi tiga direktorat; Pengairan, Cipta karya dan Bina Marga.

Pria kelahiran Klaten, Jawa Tengah, (5 Juli 1943) ini, akrab dengan karyawan, teman sejawat dan amat peduli dengan masyarakat lapis bawah. Djoko sosok pekerja keras, dan disenangi para karyawan. Dia masuk DPU tahun 1970, menjadi pegawai harian Ditjen Pengairan.

Djoko, pemegang gelar insinyur teknik sipil UGM Yogyakarta, menempuh program pasca sarjana di Land and Water Development IHE, Delft Belanda, sampai meraih ijazah Dipl. HE. Djoko banyak berkecimpung di bidang pengairan dan penanggulangan banjir.

Setelah pensiun tahun 2003, Djoko masih dipercaya duduk sebagai Dewan Pengawas Perum Perumnas. Perhatiannya sangat bagi pembangunan perumahan di perkotaan. Karena itu dia mendorong pembangunan perumahan secara horisontal di kota-kota besar untuk menekan pemukiman kumuh.

Menurut Djoko, menjamurnya pemukiman kumuh ditengah kota karena warga ingin tinggal tidak jauh dari lokasi tempatnya bekerja. Akhirnya mereka membangun atau menyewa rumah di lahan-lahan terlarang, seperti bantaran kali, karena harganya jauh lebih murah.

Menteri Kesehatan

Siti Fadillah Supari



Pekerja Keras yang Ceriwis

Selepas maghrib, telepon penting dari the president's man berdering di HP Siti Fadillah Supari. Dia terkejut-kejut menerimanya. Pesannya, Fadillah harus segera ke Istana Merdeka menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pukul 20.00 WIB (20/10).

Tak sempat berpikir panjang, Fadillah mengajak mitra kerjanya di Pusdalit RS Jantung Harapan Kita, bergegas ke Istana. Sesampai di Istana, Fadillah kebingungan, karena lupa

menanyakan nama si penelpon. Setelah tanya sana, tanya sini, akhirnya Fadillah sampai juga ke ruang kerja SBY.

Doktor ahli jantung lulusan FK-UI itu, sempat shock. Jantungnya berdebar kencang ketika SBY menawarkan kepadanya jabatan Menteri Kesehatan. Mereka berdialog panjang sekali sampai lewat pukul 23.00 WIB. "Saya sempat shock karena tak pernah membayangkan jadi menteri," kenangnya.

Sesampai di kediamannya, Fadillah terkejut lagi karena rumahnya dipenuhi tamu, kerabat dan teman-temannya. Hanya setelah istirahat beberapa menit, dia mendengar namanya disebut di dalam susunan KIB yang dibacakan SBY sendiri.

Sejak pengumuman tersebut, Fadillah tidak bisa lelap, padahal pagi sekali dia harus bergegas ke Istana Merdeka untuk upacara pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu (21/10). Di benak Fadillah bermunculan sederet pertanyaan yang sulit dia jawab. Akhirnya, dia memulangkan semua pertanyaan itu kepada pernyataan singkat SBY, "saya kepingin orang yang galak memimpin Depkes." Fadillah ketawa, setengah membenarkan pernyataan SBY, mengatakan, "bukan galak, tetapi ceriwis." Fadillah memang ceriwis, tegas, pekerja keras, tetapi demi kebaikan.

Perempuan kelahiran Solo, 5 November 1950 ini, mengabdikan kedokteran dan penelitian selama 25 tahun. Prioritasnya, menertibkan tarif rumah sakit yang lebih mementingkan aspek komersial ketimbang fungsi sosial. Dia merencanakan menarik sebagian keuntungan rumah sakit kaya untuk membantu masyarakat tak mampu. "Ini ada aturannya," kata Fadillah.

Sebagaimana yang dianjurkan SBY, dia akan lebih peduli bagi perbaikan kesehatan masyarakat tidak mampu, memberi mereka kemudahan dirawat di rumah sakit. Fadillah juga akan lebih memperhatikan peningkatan pelayanan Puskemas yang bertebaran di seluruh tanah air. Juga segera membenahi internal Depkes agar lebih disiplin dan tanggap terhadap masalah kesehatan masyarakat.

Menteri Pendidikan Nasional

Bambang Sudibyo



Mengabdikan di Pendidikan

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mempercayakan Bambang Sudibyo memimpin departemen pendidikan nasional. Guru besar UGM ini sebenarnya lebih banyak bergelut dalam soal ekonomi, dan pernah menjadi menteri keuangan semasa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid.

Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah, (8 Oktober 1952) ini, putra seorang guru agama yang menghidupi 11 orang anak. Ayahnya terpaksa kerja rangkap sebagai petani padi dan tembakau. Bambang tamat dari fakultas ekonomi UGM (jurusan akuntansi) tahun 1977. Setamat kuliah, Bambang mengabdikan di almamaternya, mengajar sampai mendapat

gelar guru besar (profesor).

Ayahnya punya idealisme yang luar biasa. Meski sebagai guru dan petani, dia ingin semua anaknya menjadi sarjana. Hampir semua potensi yang dimilikinya dikerahkan untuk menyekolahkan anak-anaknya ke perguruan tinggi, tekad yang tak dimiliki petani-petani lain di desanya.

Kata Bambang, satu dari persoalan pendidikan mendasar yang segera ditangani adalah pendidikan dasar yang menjadi akar terpuruknya mutu pendidikan. Langkah yang segera diambil memberlakukan buku pelajaran selama 5 tahun, menghapus ujian akhir nasional, diganti dengan ujian masuk, derajad guru akan ditingkatkan sama dengan profesi dokter, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dipecah dua.

Setelah meraih gelar sarjana akuntansi, Bambang tidak memilih bekerja di Bank Indonesia atau Departemen Keuangan. Dia memilih profesi pendidikan, sebab ayahnya sangat menginginkan dia menjadi dosen di UGM. Bambang memilih jalan hidup ini lantaran sikap hormat pada ayah dan ibunya. Jadi jangan heran jika Bambang diangkat menjadi Menteri Pendidikan karena jejak karirnya yang panjang di bidang belajar mengajar.

Bambang mengambil beasiswa untuk melanjutkan studi pasca sarjana di North Carolina University (1982), dan program doktoral di bidang administrasi bisnis Kentucky University, USA (1985). Setelah itu dia kembali mengabdikan di UGM.

Bambang bersama rekan-rekannya mendirikan sekolah magister manajemen UGM. Kemudian mendirikan sekolah manajemen di Jakarta.

Khusus soal pendidikan ekonomi di Indonesia, kata Bambang selama ini terlalu steril dan naif, seakan-akan berjalan dalam ruang hampa, terlepas dari peta politik, sosial, dan global. Padahal situasi tersebut memiliki pengaruh yang besar sekali. Masalah ekonomi sangat berkaitan dengan soal politik. "Rusaknya ekonomi Indonesia bukan karena pranata ekonomi tetapi pemetaannya yang rusak," kata Bambang.

Sekarang, kata Bambang, ekonomi Indonesia terkungkung oleh tiga lapis risiko yakni risiko sosial, risiko polkam dan risiko global. Selain sebagai ekonom, Bambang punya kepedulian terhadap perkembangan politik. Bersama rekan sekampus, Amien Rais, Bambang ikut mendirikan Partai Amanat Nasional. Tetapi dia memilih tetap menjadi pegawai negeri.

Hobi utamanya sejak dulu, membaca. Dia senang membaca buku-buku ekonomi, filsafat, sosial, dan budaya. Bambang juga penggemar tanaman bunga. Olahraga yang ditekuninya, jalan kaki (jogging).

Istri Bambang, Retno Sunarminingsih, wakil rektor UGM yang juga menyandang gelar profesor doktor. Pasangan ini aktif dalam berbagai lembaga penelitian UGM. Ketika menjabat Menkeu selama 10 bulan, Bambang belajar banyak hal dalam waktu singkat. Di jabatan barunya, Bambang bisa berbuat banyak hal bagi pembelajaran generasi muda bangsa.

Menteri Sosial

Bachtiar Chamsyah



Nakhoda Kapal Karam

Nama Bachtiar Chamsyah mencuat ketika memimpin Pansus Bulogate, DPR, yang menandai kejatuhan Presiden KH Abdurrahman Wahid, Juli 2001. Dalam kabinet Gotongroyong, Bachtiar dipercaya Presiden Megawati untuk menghidupkan kembali departemen sosial yang dibubarkan oleh Wahid. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merasa tidak perlu mengganti Bachtiar yang dinilai berhasil

memimpin Depsos.

Sarjana ekonomi yang mengaku belajar politik dari emaknya

(ibunya) ini, merintis karir politiknya dari bawah. Dia kader terbaik PPP sampai terpilih menjadi salah seorang ketua dewan pimpinan pusat PPP. Terakhir Bachtiar didaulat bertarung melawan Hamzah Haz untuk merebut posisi ketua umum, namun kalah. Kendati demikian, Bachtiar memilih loyal pada garis perjuangan partai, menghindari munculnya konflik.

Bachtiar menyelamatkan nasib 2.500 karyawan Depsos yang kehilangan pekerjaan serta jutaan orang yang memerlukan bantuan sosial. Alasan Wahid alias Gus Dur membubarkan Depsos hanya karena dia menganggap di situ bersarang KKN.

Ketika Gus Dur memerintah, jutaan orang meninggalkan kampung halaman mereka akibat konflik berdarah di Ambon, Aceh dan Poso. Permasalahan ini menumpuk selama dua tahun. Belum lagi jutaan anak terlantar, fakir miskin dan TKI yang diusir dari luar negeri. Semuanya membutuhkan uluran tangan Depsos. Ketika pemerintahan beralih ke tangan Megawati, Depsos dihidupkan kembali. Bachtiar diberita tugas mengangkat kembali kapal karam tersebut. Ternyata dia berhasil melakukan tugasnya.

Pria berdarah Minang yang lahir di Aceh (31 Desember 1945) ini, seperti kejatuhan bulan ketika SBY mempercayakannya untuk melanjutkan misinya yang belum selesai. Masalah pengungsi akibat konflik memang mereda, tetapi muncul masalah baru, pengusiran ratusan ribu TKI ilegal dari Malaysia. Agaknya Depsos tidak pernah sepi dari masalah sosial yang memerlukan penanganan segera.

Bachtiar hampir tak pernah bersentuhan dengan bidang yang menjadi jurusan pendidikannya, sarjana ekonomi (akutansi) Universitas Medan Area. Dia hanya sempat menjadi guru dan pegawai honor Pemda Sumut sampai dipilih menjadi anggota DPRD (1982-1987). Selanjutnya dia terpilih menjadi anggota DPR mewakili PPP sampai diangkat sebagai Mensos tahun 2001.

Bachtiar merasa berbahagia meskipun tugasnya mengangkat kapal karam sangat berat. Dia harus menata ulang struktur Depsos yang porak poranda, karyawan yang cerai berai serta masalah sosial yang menggunung. Karena itu dia meminta DPR memberi anggaran yang cukup untuk melaksanakan pekerjaan besar tersebut.

Bachtiar merenung, mendapat inspirasi dari Toynbee dengan bukunya A Study of History, bahwa Depsos ibarat biji yang dipendam lantas tumbuh sebagai tanaman baru yang akan memberi manfaat bagi banyak orang.

Bachtiar harus tampil sebagai teladan, masuk kantor pukul 7.00 pagi, kembali ke rumah rata-rata pukul 19.30 malam. Sebab jutaan orang menanti kehadiran kembali Depsos. Di dalam wujud barunya, Depsos memang memberi manfaat bagi banyak orang yang menghadapi hambatan sosial.

Menteri Agama

Muh. Maftuh Basyuni



Depag Harus Jadi Contoh

Panggilan telepon jarak jauh hari Minggu (17/10) memuat pesan penting buat Muhammad Maftuh Basyuni, Duta Besar RI untuk Arab Saudi. Basyuni harus bergesah ke tanah air untuk memenuhi panggilan istimewa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Cikeas. Agaknya Basyuni diminta bersiap-siap menempati pos Menteri Agama.

Dalam dialog di Cikeas, SBY banyak membicarakan perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dengan Basyuni. Selaku Dubes yang ditugaskan di Arab Saudi, tentu Basyuni sedikit banyak tahu tentang penyelenggaraan ibadah haji. Namun, ketika ditanya program perbaikan, Basyuni secara diplomatik menjawab belum tahu, karena dia juga belum tahu akan ditempatkan di posisi mana.

Sebenarnya Basyuni seorang diplomat karir di Departemen Luar

Negeri. Dia juga sedang bertugas di luar negeri ketika Presiden Soeharto menunjuknya sebagai Kepala Rumah Tangga Kepresidenan. Mujur baginya tatkal Presiden KH Abdurahman Wahid mengangkatnya sebagai Menteri Sekretaris Negara, meskipun masa tugasnya tidak lama.

Basyuni, kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 4 November 1939, meraih gelar sarjana dari Universitas Islam Madinah, Arab Saudi. Dia juga alumni Pondok Pesantren Gontor, Jatim. Basyuni pernah menjadi Ketua Delegasi RI pada Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Konferensi Islam (OKI-2004), dan sekretaris pribadi Dubes RI di Riyadh (1976-1979).

Sebelumnya, Basyuni mengetahui lewat pemberitaan pers bahwa di Departemen Agama banyak terjadi korupsi. Karena itu, dia ingin Depag jadi teladan penegakan moral bagi departemen-departemen lainnya. "Depag melekat dengan urusan agama, artinya mengajak orang untuk berbuat kebaikan," kata Basyuni.

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata

Jero Wacik



Pariwisata Butuh Keamanan

Sukses Bali menjadi pusat pariwisata, dalam beberapa tahun terakhir, menempatkan putra terbaiknya di kursi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Jero Wacik, pria kelahiran Singaraja, selaku menteri, menggantikan I Gde Ardhika.

Dalam pertemuan delapan menit dengan SBY di Cikeas (19/10-2004), Jero dibombardir pertanyaan seputar masalah pariwisata. Untung Jero, penyandang dua gelar sarjana, insinyur ITB dan sarjana ekonomi UI, pernah bergerak di bidang pariwisata. Dua dari tiga perusahaannya, bergerak di bidang perhotelan dan biro perjalanan. Dia juga aktif di Partai Demokrat.

Ketika kuliah di ITB, Jero bekerja paruh waktu di beberapa perusahaannya seorang pekerja keras. Saat masih duduk di bangku ITB, dia bekerja di beberapa perusahaan tekstil di Bandung sebagai anggota tim peneliti. Dia juga asisten dosen untuk jurusan Fluid Mechanics and Thermodynamics Mechanical Engineering, ITB. Setamat kuliah, Jero diterima bekerja di PT United Tractors sebagai asisten servis manajer (1974-1975). Di anak perusahaan kelompok otomotif terkemuka, Astra International, karir Jero sampai jabatan Government Sales Manager (1990)

Selain berkecimpung di bidang otomotif dan pariwisata, Jero punya komitmen tinggi pada dunia pendidikan. Dia menyisihkan waktunya menjadi dosen mata kuliah pemasaran dan kewirausahaan di FE-UI. Jero juga penulis buku; Cara Mudah Menjadi Wirausaha, Fisika untuk SMA dan Matematika untuk SMA.

Jero bertekad mengangkat kembali pariwisata yang terpuruk akibat berkecamuknya terorisme. Pariwisata tetap diharapkan sebagai sumber devisa negara. Karena itu, pembenahan pariwisata akan dimulai dari pengamanan aset-aset wisata serta jaminan rasa aman.

Targetnya sangat ambisius, menarik 10 pengunjung asing setiap tahun, mungkin bisa dicapai sampai tahun 2009. Sektor pariwisata telah menyumbang 5 miliar dolar AS pada kocek devisa negara dengan angka kunjungan 4,5-5 juta turis manca negara setahun.

Masalah keamanan menjadi kendala utama memacu dunia pariwisata. Jero akan bekerjasama erat dengan aparat keamanan pada setiap obyek wisata. Dalam 100 hari pertama, dia akan mengunjungi berbagai obyek wisata. Dia memulai safari keamanan wisata dari Bali, dilanjutkan ke Yogyakarta, Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan.

Prioritas kedua menyiapkan setiap komponen pariwisata untuk

menekankan hospitality. Soalnya di sejumlah obyek wisata, hospitality menurun. Secara bersamaan dilakukan promosi keluar negeri. Untuk mengalakkan pariwisata domestik akan dicanangkan motto; Kunjungi Negerimu, Cintai Negerimu.

Program budaya ikut menggerakkan mesin industri pariwisata. Budaya dan pariwisata akan mendapat tempat yang sama. Karena itu dia butuh masukan dari para aktivis budaya dan pariwisata.

Menteri Negara Ristek

Kusmayanto Kadiman



Diundang Tes Via HP

"Mimpi kali yee," kata Kusmayanto Kadiman ketika menerima panggilan HP dengan nomor pribadi. Dia menganggapnya perbuatan orang iseng. Tetapi tak urung juga, pagi itu (15/10), Kusmayanto meluncur dengan mobil Kijangnya dari Bandung ke Cikeas. Ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuknya selaku Meneg Riset dan Teknologi.

Di Cikeas, Kusmayanto memaparkan masalah penelitian, infrastruktur, telekomunikasi dan peningkatan mutu pendidikan Indonesia agar mampu bersaing di tingkat regional. Kepada SBY dia menyatakan siap jadi menteri.

Dr. Kusmayanto lahir di Bandung, 1 Mei 1954. Dia menyelesaikan program doktor di bidang System Engineering, Australian National University, Australia, tahun 1988. Ketika ditunjuk jadi Menristek, Kusmayanto masih menjabat rektor ITB. Kusmayanto memang aktif di bidang penelitian. Dia juga pendiri dan pelaksana harian Program Studi S-2 bidang Instrumentasi dan Kontrol Teknik Fisika ITB.

Undangan ke Cikeas via hand phone (telepon genggam) untuk wawancara dengan SBY semula ditanggapi Kusmayanto dengan nada bercanda. Soalnya dia tak pernah menduga akan menerima undangan seperti itu. Juga tak ada sepucuk surat resmi dari orang SBY.

Seorang pria dengan nada mantap dan berat, mengucapkan selamat pagi dan bertanya tentang apa yang sedang dilakukannya, Kusmayanto malah menjawab seadanya: "Saya sedang mengenakan sepatu." Kusmayanto memang sedang mengenakan sepatu, bersiap-siap menuju kampus ITB.

Detik berikutnya, sang penelepon mengundang Kusmayanto datang ke Cikeas untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan menjadi calon menteri. Pria itu memintanya datang ke Cikeas pukul 15.30 sore. Agar lebih meyakinkan, menyebut namanya dan meminta nomor faksimile kediaman Kusmayanto. Karena rektor ITB itu menjawab tidak punya, maka surat undangan tes dibaca via telepon.

Kusmayanto pun pagi itu bergegas ke Cikeas karena ternyata si penelpon adalah orang dekat presiden.

Menteri Negara Koperasi & UKM

Suryadharma Ali



Buka Akses KUKM Pertanian

Agaknya pos Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan jatah PPP. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Suryadharma Ali, petinggi PPP, memimpin kementerian tersebut, tadinya dipimpin Alimarwan Hanan, juta petinggi PPP.

Pengalaman bidang ekonomi Surya ketika menjadi deputi direktur PT Hero Supermarket dan Ketua Komisi V DPR. Pria kelahiran

Jakarta, Jakarta, 19 September 1956 ini, lulusan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Surya sudah menginventarisir 12 prioritas untuk program 100 hari pertama. Dua di antaranya, membuka akses KUKM ke perbankan dan penyelesaian tunggakan Kredit Usaha Tani. Tetapi kesemuanya harus dibicarakan dulu dengan presiden.

Pendahulunya, Alimarwan, mengharapakan Surya melanjutkan upaya mengangkat status KUKM menjadi Departemen Koperasi. Ini semacam utang yang belum terbayar.

Menteri Negara Kominfo

Sofyan A Djalil



James Jadi Menteri

Kisah hidup anak petani ini pantas dijadikan inspirasi bagi penimba pengalaman. Mantan Asisten Kepala Badan Pembina BUMN/ Staf Ahli Meneg BUMN, ini bak mutiara yang masih terpendam sebelum diangkat menjadi Menkominfo (Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) Kabinet Indonesia Bersatu. Dia mutiara bangsa (berjiwa kebangsaan dan negarawan) dari Aceh.

Suami Ratna Megawangi ini seorang profesional, dosen dan konsultan spesialisasi implementasi *good corporate governance* dan *corporate communication*. Dia berobsesi, di mana pun berada, dapat memberikan nilai tambah (*added value*) sebagai amal soleh.

Kunci keberhasilannya adalah belajar dan bekerja keras serta menerima apa adanya. Putera bangsa kelahiran Perlak, Aceh, 23 September 1953, ini mewarisi kebersahajaan dan kecerdasan otak dari kedua orang tuanya, terutama Sang Ibunda. Dia berpendidikan akademis luar negeri, berpengalaman luas, bersih dan berdedikasi tinggi. Dia menguasai hukum bisnis, kebijakan publik, pasar modal dan tentang pengelolaan perusahaan yang baik dan bersih.

Putra pasangan pemangkas rambut dan peternak bebek dari dusun pegunungan Perlak, Sofyan Djalil, laksana pengemban mission impossible. Suatu keajaiban terjadi tatkala dia bergabung ke dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menempati kursi Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Sofyan yang lahir di Perlak, Aceh, 23 September 1953, meniti hidupnya dengan keras, penuh keprihatinan. Ibundanya harus mengumpulkan telur bebek, hari demi hari, dijual ke pasar untuk membiayai sekolah putranya dari tingkat ibtidaiyah sampai PGA. Sedangkan ayahnya petani miskin sembari menjual jasa pangkas rambut untuk mencukupi kebutuhan hidup sekeluarga.

Setamat PGA, Sofyan ingin memutus mata rantai kemiskinan keluarganya dengan mengajar. Dia diterima sebagai guru agama honorer. Dua tahun menanti pengangkatan, Sofyan akhirnya tak tahan juga. Sofyan pindah jadi buruh pabrik karet, bekerja dua tahun, juga tidak menolong.

Hijrah, keluar dari Aceh, satu-satunya jalan untuk memperbaiki nasib. Kebetulan Sofyan terpilih menjadi anggota delegasi Aceh ke Muktamar Nasional PII di Jakarta, tahun 1976. Setelah muktamar, Sofyan membelot, tidak kembali ke Aceh, tetapi memilih menetap di Jakarta.

Kesulitan serius dimulai dari sini. Sofyan, di Jakarta, seperti anak hilang yang tidak memiliki seorang pun sanak famili, terpaksa tinggal di mesjid Menteng Raya di dekat markas besar PII. Lama kelamaan dia dipercaya jadi penjaga mesjid. Sofyan pun mendapat nama baru yang keren dari teman-temannya, James, padahal hanya singkatan penjaga mesjid.

Bosan tinggal di mesjid, tahun 1977, Sofyan melamar kerja di Kejaksaan Agung. Ditanya soal alamat dan pengalaman kerja, Sofyan berterus terang, tinggal dan menjaga mesjid Menteng Raya. Di

Kejagung dia diterima, tetapi dengan pekerjaan yang sama, mengurus mesjid Pusdiklat. Profesiinya tetap James, tetapi statusnya berubah, pegawai Kejagung.

Tahun 1978, Sofyan mencuri kesempatan bekerja pagi, kuliah sore hari. Tempat kuliahnya pun keren, Fakultas Hukum UI, mengambil bidang studi hukum bisnis, tamat tahun 1983.

Keajaiban demi keajaiban mulai dari sini. Sofyan meninggalkan Kejagung, diterima sebagai peneliti pada CPIS (Center for Policy and Implementation Studies), Departemen Keuangan. Dia terlibat dalam berbagai proyek penelitian, termasuk Program Perdagangan Internasional dan Restrukturisasi BUMN.

Karena kecerdasan dan ketekunannya, CPIS memilih Sofyan untuk mengikuti program bea siswa di Tufts University, AS. Tahun 1993, Sofyan meraih gelar doktor dari The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University.

Kembali ke Jakarta, Sofyan diterima sebagai staf ahli Meneg Pembinaan BUMN Tanri Abeng. Tugas utamanya menghadapi para demonstran mahasiswa yang menentang program privatisasi BUMN. Sementara itu dia mengajar di UI, dia juga menjadi konsultan berbagai kegiatan penelitian.

Lantas bagaimana kisahnya dia bisa menggaet perhatian SBY dan Wapres Jusuf Kalla? Sofyan tertarik pada kedua tokoh ini, ikut aktif sebagai relawan pemenangan pasangan SBY-JK. Kerja keras, loyalitas Sofyan berbuah kursi menteri.

Modal hidupnya, tekun beribadah, kerja keras, pantang menyerah, jujur, mudah menjalin kerjasama dengan orang lain.

Menteri Negara Lingkungan Hidup

Rachmat Witoelar



Karir Puncak Veteran Politik

Penantian panjang Rachmat Witoelar untuk duduk di kursi menteri berakhir juga. Pantas jika dia memperoleh jabatan menteri karena ketua penasihat tim pemenangan Susilo Bambang Yudhoyono-M. Jusuf Kalla. Rachmat menempati pos Meneg Lingkungan Hidup.

Sebenarnya Rachmat pernah dekat dengan pusat kekuasaan tatkala menjabat Sekretaris Jenderal Golkar (1988-1993).

Karena itu Rachmat diusulkan duduk di salah satu pos menteri.

Agaknya Presiden Soeharto tidak berkenan. Satu-satunya jabatan resmi yang disandanginya semasa pemerintahan Pak Harto, menjadi Duta Besar RI untuk Rusia (1993-1997). Tetapi dia bertahan di DPR selama 21 tahun.

Mulanya pria kelahiran Tasikmalaya, 2 Juni 1941 ini, insinyur Teknik Arsitektur ITB. Tetapi setelah tamat kuliah dia cenderung terjun ke panggung politik praktis. Meskipun latar belakang pendidikannya tidak relevan dengan posisinya sekarang, Rachmat siap mendalami dan menangani masalah lingkungan hidup. Rachmat menerima jabatan tersebut sebagai amanah.

Namun demikian Rachmat mendapat dukungan penuh dari istrinya, Erna Anastasia Witoelar. Erna, aktivis lingkungan hidup yang pernah dipercaya Presiden KH Abdurrahman Wahid menjabat Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah. Erna pernah menjadi anggota panitia persiapan The World Summit on Sustainable Development (KTT Pembangunan Berkelanjutan) di Johannesburg, Afrika Selatan, tahun 2002.

Tak lama setelah menjabat Meneg Lingkungan Hidup, Rachmat menghadiri temu kalangan masyarakat, LSM dan akademis di Bandung. Di situ dipersoalkan sejumlah kasus lingkungan hidup yang tidak terselesaikan. Rachmat melihatnya sebagai wujud ketidakmampuan aparat menangani persoalan lingkungan hidup.

Aparat pemerintah kebingungan menangani proyek yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Contohnya, rencana

pembangunan Waduk Jatigede yang terkatung-katung sejak tahun 1970-an. Rencana itu tak terwujud, bahkan sudah kadaluarsa.

Menyikapi masalah tersebut, Rachmat meminta aparat pemerintah terbuka kepada masyarakat. Juga perlu transparansi tentang biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan proyek tersebut.



Menteri Pemberdayaan Perempuan

Meutia Farida Hatta



Risaukan Pelecehan

Menjelang tengah malam (21/10), Presiden Susilo Bambang berjalan menuju podium di Istana Negara. Sementara itu, Meutia Hatta menunggu, sejak pukul 20.00 WIB, di depan pesawat televisi di kediamannya di Rawamangun dengan perasaan berdebar. Putri proklamator kemerdekaan itu akhirnya lega ketika namanya disebut sebagai Meneg Pemberdayaan Perempuan.

Meutia membuka pintu rumahnya dan menyambut hangat para wartawan serta kru televisi sejak lepas magrib. Wajahnya tampak berseri-seri. Didampingi suami, putra tunggal dan dua saudara perempuannya, Meutia duduk tegang di depan pesawat televisi 21 inci di ruang tengah.

"Mestinya kita tidak duduk di sini. Gimana kalau tidak jadi," canda Prof. Sri Edi Swasono yang duduk di samping istrinya, Meutia yang lahir di Yogyakarta, 21 Maret 1947.

Meutia, setelah dipanggil SBY ke Cikeas (15/10), berharap menjadi Menteri Pariwisata atau Menteri Sosial. Tetapi dalam sebuah lewat SMS, pos Depsos tetap ditempati Bachtiar Hamsyah. "Wah tinggal kemungkinan dua posisi buat gue," sergap Meutia. Yang dia maksud Meneg Pariwisata dan Pemberdayaan Perempuan.

Doktor antropologi Universitas Indonesia itu menjabat Deputy Menteri Kebudayaan dan Pariwisata ketika diangkat menjadi menteri negara. Sampai sekarang dia masih menjadi dosen dan menjabat ketua Jurusan D-3 Pariwisata Fisip UI.

Hal serius yang mencemaskan Meutia adalah pelecehan terhadap perempuan, dan ini harus diberantas. Pelecehan terhadap perempuan terjadi di seluruh lapisan, dari bawah sampai ke atas. Juga publikasi media massa dinilainya cenderung melecehkan citra perempuan. Mampukah dia mengatasi semua ini?

"Tayangan televisi dan publikasi media massa terhadap kejahatan yang menimpa perempuan sifatnya tidak mendidik," kata Meutia.

Menurut Meutia media massa perlu mempertimbangkan aspek pendidikan, akhlak dan moral serta empati agar bangsa Indonesia menghargai dirinya sendiri, khususnya kaum perempuan. Soal

perdagangan perempuan dan anak, kata Meutia, terjadi berkaitan dengan pola pikir dan budaya.

Meutia mengatakan kaum perempuanlah yang menentukan akan menjadi seperti apa bangsa ini kelak. Kepedulian sosial ditujukan terutama terhadap janda-janda yang punya anak. Para janda itu hendaknya tidak dilecehkan karena mereka harus membesarkan anak-anak mereka yang akan menjadi generasi penerus bangsa.

Perubahan memang tidak semudah membalik telapak tangan. Paling tidak perubahan itu dimulai dengan pola pikir yang berorientasi ke masa depan. Dia masih meneliti program pemberdayaan perempuan yang bisa dilakukan dalam waktu dekat. Susahnya dia tidak bisa melakukannya sendirian, harus membuka jaringan kerjasama dengan sektor lain.

Menteri Negara PAN

Taufiq Effendi



Penertiban di Unit Bawah

Partai Demokrat yang mengusung nama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak awal, mendudukkan wakilnya Taufiq Effendi di pos Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara. Taufiq berjanji meningkatkan fungsi aparaturnya sebagai pelayan publik.

Langkah pertama menteri kelahiran Barabai, Kalimantan Selatan, 12 April 1941, ini turba ke kantor-kantor pelayanan publik, seperti kelurahan dan kecamatan untuk meyakinkan bahwa pelayanan publik dilakukan dengan baik.

Pensiunan brigadir jenderal polisi, ini menyandang gelar MBA dari Universitas Jayabaya, Jakarta. Taufiq juga tamatan The International Police Academy, Washington DC, AS. Di Partai Demokrat menjabat wakil sekretaris jenderal.

Hal-hal yang menjadi fokus perhatiannya, seperti proses pembuatan KTP. Kunjungan ke kantor-kantor pelayanan publik dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh komitmen aparaturnya memberi pelayanan publik yang terkesan dipersulit.

Kementerian PAN masih mengalami sejumlah kendala di dalam meningkatkan pelayanan publik, misalnya sebagian besar aparat negara yang memberi pelayanan di bawah standar. Prosedur biaya, waktu, dan kualitas pelayanan belum transparan. Masih terjadi praktik pungutan liar dan korupsi.

Menteri Negara PP/Kepala Bappenas

Sri Mulyani Indrawati



Bukan Selera Pribadi

Nama Sri Mulyani Indrawati masuk bursa kabinet sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memenangkan pemilihan. Namun dia dikedem lantaran menjadi petinggi IMF. SBY tak bergeming, tetap mengangkat Mulyani sebagai Meneg Perencanaan Pembangunan merangkap Kepala Bappenas.

IMF dikedem lantaran keagalannya memulihkan krisis ekonomi Indonesia. Tahun lalu pemerintahan Presiden Megawati mengakhiri kerjasama dengan IMF yang masuk ke sini sejak tahun 1997. IMF dinilai malah membuat krisis perekonomian terperosok semakin dalam.

Mulyani membela diri bahwa IMF tidak bisa dikendalikan oleh seseorang, di lembaga moneter dunia itu ada 3000 orang. Dia hanya seorang dari 34 menteri KIB, tentu tak mungkin dia mendikte presiden,

wakil presiden dan 33 menteri lainnya. "Program pembangunan bukan ditentukan atas selera pribadi, tetapi keputusan bersama," kata Mulyani.

Penegasan Mulyani menghilangkan keraguan atas dirinya selama ini. Begitu menjabat menteri, Mulyani mengajukan permohonan pengunduran diri dari jabatan pentingnya, Direktur Eksekutif IMF untuk Asia-Pasifik.

Menurut Mulyani Indonesia mutlak membutuhkan investasi untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Selain investasi, penggerak pertumbuhan ekonomi adalah sektor fiskal dan konsumsi. Jadi pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan fiskal, apalagi APBN masih menghadapi beban berat pengembalian utang. Juga subsidi yang besar sangat membebani anggaran.

Jika pemerintah ingin mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi maka perlu membangun prasarana yang memadai untuk memperbaiki iklim dan merangsang investasi. Tak sepatutnya mengandalkan pertumbuhan semata-mata pada sektor konsumsi. Makro ekonomi juga harus dijaga agar stabil.

Mulyani yang lahir di Tandjung Karang, Lampung, 26 Agustus 1962, menyandang gelar sarjana ekonomi UI dan doktor kebijakan ekonomi dari University of Illinois Urbana Champaign, AS, tahun 1992. Dia juga spesialisasi penelitian di bidang ekonomi makro, ekonomi keuangan negara/publik, ekonomi moneter dan perbankan dan ekonomi tenaga kerja.

Mulyani memiliki segudang pengalaman kerja, misalnya Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FE-UI, Nara Sumber Sub Tim Perubahan UU Perbankan, Tim Reformasi Hukum, Anggota Tim Penyelenggara Konsultan Ahli Badan Pembinaan Hukum Nasional, Anggota Kelompok Kerja Bidang Hukum Bisnis, Anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter, Redaktur Ahli Majalah bulanan Manajemen Usahawan Indonesia, Anggota Komisi Pembimbing mahasiswa S-3 Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, IPB, dan Kepala Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik, UI.

Mulyani lama menetap di Amerika menjadi konsultan program USAid yang memberi beasiswa bagi para dosen di universitas-universitas daerah di Jawa, Aceh, Kaltim, Sulut dan Papua. Masa tugasnya diperpanjang setahun, karena dia diperlukan untuk memberi konsultasi pengelolaan program USAid di bidang otonomi daerah. Dia juga mengajar tentang ekonomi makro dan perekonomian Indonesia di Georgia University, AS.

Hidup ini hanya sementara. Maka Mulyani hanya ingin melakukan dan memberikan yang terbaik kepada bangsa, negara, agama dan keluarga.

Menteri Negara BUMN

Sugiharto



Tolak Privatisasi Serampangan

Semula rekan-rekannya memprediksi Sugiharto ditempatkan di pos departemen perindustrian atau energi. Namun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono punya pertimbangan lain. Sugiharto dipercaya menjabat Meneg Pembinaan BUMN.

Sugiharto memang anggota dewan pakar PPP, tetapi sudah tiga tahun tidak aktif. Dia dipilih menjabat menteri lebih karena seorang profesional. Dia direktur keuangan sebuah perusahaan minyak nasional, Medco Energy International Tbk.

Privatisasi BUMN dan divestasi bank tidak lagi dilakukan serampangan. Ini janji Sugiharto setelah dilantik jadi menteri. Karenanya dia akan mengkaji kembali kedua program tersebut untuk disempurnakan. Pelaksanaannya harus memenuhi tiga persyaratan, waktu, harga dan jumlahnya.

“Maksudnya supaya jangan sampai ada aset negara yang dijual serampangan,” kata Sugiharto.

Setiap langkah privatisasi mesti dijelaskan kepada masyarakat, dilakukan secara bersih dan bertanggung jawab. Dia tidak ingin kementeriannya diintervensi atau jadi sapi perah kepentingan politik.

Tetapi Sugiharto tidak berani terlalu pagi menuding BUMN sebagai sarang korupsi, meski demikian dia tetap membuka Kotak 5000 untuk menampung pengaduan masyarakat. Ini sebagai faktor pencegah dan pengendali.

Sugiharto punya pengalaman panjang di lembaga keuangan Chemical Bank and Bankers Trust Company, New York. Dia punya kemampuan analisis yang prima. Bahkan, dia juga menjadi penakluk para bankir untuk mencairkan pinjaman dana. Tidak salah kalau pemilik Medco Grup, Arifin Panigoro, menunggu lima bulan ketika melamarnya bergabung ke Medco.

Pria kelahiran Medan, 29 April 1955 ini, setiap hari biasa bekerja sampai tengah malam. Dia Master of Business Administration (MBA) dari Universitas van Amsterdam, Belanda, 1997.

Dia juga bicara tentang program 100 hari pertama. Pemerintah, dalam memperbaiki ekonomi, harus kembali ke asal. Memperlihatkan orang-orang yang bisa diterima pasar. Ini akan menaikkan persepsi indeks. Sekarang, tingkat investasi Indonesia di grade B, satu langkah lagi ke grade BB.

Dana yang beredar di Asia, kata Sugiharto, mencapai triliunan dollar AS, mengincar tempat parkir. Mungkin nanti Indonesia kembali jadi rebutan investor.

Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

Adyaksa Dault



Prioritaskan Olahraga

Memang banyak orang yang kaget ketika Adyaksa Dault dipanggil Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke kediaman pribadinya di Cikeas, Bogor. Rupanya Adyaksa rekan lama SBY, juga sesama mahasiswa program doktoral IPB, Bogor.

Banyak calon yang diusulkan menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga, tetapi SBY lebih condong memilih Adyaksa, mantan ketua umum KNPI. Tokoh pemuda kelahiran

Donggala, 7 Juni 1963 ini tak pernah bermimpi menjadi menteri.

Meski mengaku kurang memahami persoalan olahraga, dia berjanji memprioritaskan pengembangan olahraga selama menjabat menteri.

Langkah pertama yang akan dia ambil, duduk semeja dengan para pengurus KONI dan petinggi Direktorat Jenderal Olahraga, Departemen Pendidikan untuk membuat cetak biru program pengembangan olahraga. Setelah itu, dia mengajak kedua instansi tersebut untuk melaksanakan program tersebut bersama-sama.

Adyaksa berjanji membangun sinergi dengan Ketua KONI Agum Gumelar dan Dirjen Olahraga Toho Cholik Mutohir. Dia akan menjalin komunikasi yang berkesinambungan dengan semua unsur olahraga. “Tanpa komunikasi akan sulit memajukan olahraga,” kata Adhyaksa.

Akankah terjadi tumpang tindih di antara ketiga lembaga olahraga tersebut? Tentu tidak. Sebab di antara ketiganya sudah ada garis batas yang jelas. Kementerian Olahraga hanya melakukan koordinasi, terutama dalam soal dana. Sedangkan KONI bergerak di bidang prestasi olahraga, dan Ditjen Olahraga di sektor pendidikan.

Olahraga benar-benar dunia yang asing buat Adyaksa. Karena itu dia akan mempelajari kembali Rancangan Undang-Undang Olahraga yang mengendap di Sekretariat Negara. Bila ada kekurangan, dia akan memperbaikinya agar dapat disahkan.

Pada hari-hari pertama menjadi menteri, prioritas Adyaksa adalah membenah persoalan internal. Kementerian itu, setelah lama

dilikuidasi, kehilangan kantornya di kawasan Senayan, bersebelahan dengan gedung TVRI. Lantas dia akan mengangkat para staf.

“Saya perlu bantuan orang-orang yang tepat. Tidak asal mengangkat,” katanya. Dia meminta waktu sebelum hasil kerjanya dinilai.

Master lulusan FISIP UI, itu sedang mengikuti program doktoral IPB jurusan Teknik Kelautan. Dia pernah menjadi Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara Dault and Associates. Ketua Ikatan Pensehat Hukum Indonesia (IPHI), tahun 1999-2004, dan Ketua Umum KNPI tahun 1999-2002.

Adyaksa, putra pengacara terkemuka H.M. Dault. Dia masih keluarga dekat istri bekas calon presiden dari Golkar, Wiranto.

Menteri Negara PPDT

Saifullah Yusuf



Mengubah Citra

Mantan Sekjen (Sekretaris Jenderal) yang akhirnya direposisi menjadi salah seorang Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini memilih mendukung Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla (SBY-JK) pada Pemilu Presiden putaran kedua 2004. Pilihan itu telah mengantarkannya dipercaya SBY-JK menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu.

Kemudian, setelah sempat terjadi perdebatan tentang keberadaan fungsionaris DPP PKB yang merangkap jabatan di Kabinet Indonesia Bersatu, rapat pleno DPP PKB yang digelar Selasa malam 26 Oktober 2004, memutuskan, Ketua Umum PKB Alwi Shihab (yang menjadi Menko Kesra KBI) dan Ketua PKB Saifullah Yusuf yang menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kabinet Indonesia Bersatu diberhentikan dari jabatannya di PKB.

Politisi muda ini tak mudah didikte oleh Gus Dur. Ia satu-satunya “penentang terbuka” Gus Dur yang bisa bertahan di posisi strategis PKB. Padahal, secara pribadi, Gus Dur itu selain sebagai paman juga guru baginya. Tapi sebagai Sekjen PKB, prinsip dan sikap-tindaknya sering berseberangan dengan Gus Dur.

Nahdliyin kelahiran Pasuruan, Jatim, 28 Agustus 1964 ini menampakkkan sosok yang berbeda dengan beberapa fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) lainnya yang selalu patuh kepada Gus Dur, selaku Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Suatu jabatan yang secara realitas tampak mempunyai kekuasaan tertinggi di PKB.

Sebagai menteri, dia tampak ingin mengubah citra Kantor Kementerian Negara Percepatan Pembangunan Indonesia Timur yang kini menjadi Kementerian Negara Pengembangan Daerah Tertinggal. Pertanda ke arah itu terlihat dari kemampuannya mencairkan suasana saat serah terima jabatan (Sertijab) di kementerian yang berkantor di Jalan Abdul Muis 7, Jakarta itu. Tidak terkesan kaku seperti sebelumnya. Saat memberikan sambutan, dia sering memancing tawa para staf kementerian yang berada satu kompleks dengan Kantor Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Ketua umum GP Ansor itu pun bercerita, saat dirinya menjadi wartawan baru di tabloid Detik, yang kemudian dibredel pemerintahan Orde Baru, dia justru banyak belajar dari Manuel yang saat itu menjadi wartawan senior harian Kompas. Dia menyebut Manuel sebagai gurunya.

Dia pun bercanda dengan meminjam guyonan ala warga Madura. “(Ara sertijab ini adalah penyerahan guru kepada murid. Dalam istilah orang Madura, Pak Manuel itu menteri, saya hanya penggantinya,” katanya yang disambut gelak tawa para staf dan pegawai kementerian. Alumnus Universitas Nasional (Unas) Jakarta itu pun mengaku bahagia bisa melanjutkan tugas Manuel.

Menteri Negara Perumahan Rakyat
Yusuf Ashari



Tidak Punya Jas Baru

Waktu terasa berjalan sangat lambat di kediaman Muhammad Yusuf Ashari. Sampai pukul 22.00 WIB, semua saluran televisi nasional belum menampilkan pengumuman susunan kabinet pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Wapres M. Jusuf Kalla.

Anggota Majelis Pertimbangan PKS itu duduk santai di depan pesawat televisi, hanya memakai sarung, kemeja batik lengan pendek dan peci hitam. Dia sempat nyeletuk bahwa

dia tidak merasa kecewa jika tidak jadi menteri, sebab hanya dicalonkan oleh partai. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kegelisahannya, berkali-kali membenarkan letak kopiahnya.

Yusuf, penyandang gelar sarjana UGM, Yogyakarta, jurusan akuntansi, pernah menjadi direktur keuangan RCTI. Yusuf yang lahir di Magelang, 21 Oktober 1945, ini sedang menempuh program pasca sarjana di Universitas Muhammadiyah.

SBY mengumumkan susunan kabinetnya beberapa menit menjelang tengah malam (21/10). Yusuf dipercaya menjadi Menteri Perumahan Rakyat. Pengumuman itu disambut dengan kegembiraan tidak berlebihan di kediaman Yusuf, kompleks Kelapa Dua, Depok.

Agaknya, jabatan menteri merupakan hadiah ulang tahun ke 59 bagi Yusuf, karena pengumuman KIB bertepatan dengan malam kelahirannya. Tetapi Yusuf dan istrinya, Siti Zainab, lebih menganggapnya sebagai amanat, cobaan dan ibadah di hari tua.

Merayakan ulang tahun secara sederhana, keluarga Yusuf menyediakan hidangan ayam goreng tepung, daging kecap, sup merah, tempe goreng, es kolak dan buah-buahan untuk tamu-tamunya.

Yusuf akan segera menyiapkan segala-galanya, karena dia menghidupkan kembali kementerian yang dilikuidasi semasa pemerintahan Gus Dur dan Megawati. Yusuf akan mempelajari program sejuta rumah.

Sayangnya, untuk upacara pelantikan Yusuf tidak menyiapkan stelan jas baru.

Kejaksaan Agung

Abdul Rahman Saleh



Bidik Koruptor Kakap

Tak disangka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memilih Abdul Rahman Saleh menjadi Jaksa Agung. Rahman menggeser nama-nama beken, seperti Marsilam Simandjuntak dan Todung Mulya Lubis, yang diberitakan secara luas akan menjadi pilihan presiden.

Nama Rahman merebak di media massa hanya ketika sebagai hakim agung menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda) dalam pemeriksaan kasasi Akbar

Tandjung (12/2-2004), ketika itu ketua DPR, berkenaan dengan kasus korupsi Bulog II. Setelah itu namanya tenggelam sampai dipanggil SBY ke Cikeas, Bogor, untuk duduk di dalam kabinet Indonesia Bersatu.

Pria kelahiran Pekalongan 61 tahun lalu itu, lulusan Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Rahman juga lulusan sekolah notariat FH-UI, Jakarta. Rahman meninggalkan karir 16 tahun sebagai wartawan harian Nusantara (1968-1984) untuk terjun di bidang hukum. Dia pernah menjadi Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta

(1981-1984), kini menjabat Sekretaris Dewan Penyantun Yayasan LBH Indonesia. Rahman pernah jadi notaris dan pengacara. Sebelum terpilih sebagai hakim agung, Rahman menjadi anggota KPU, mewakili Partai Bulan Bintang.

Selaku petinggi hukum yang sangat diharapkan memberantas tindak pidana korupsi, Rahman harus membersihkan dirinya sendiri dan lingkungannya. Sebelum melangkah keluar, Rahman perlu membenah aparat kejaksaan. Dia sendiri hanya memiliki tabungan Rp 700 juta lebih, sebuah sedan tua dan mobil Kijang keluaran tahun 1997. Rahman bersama keluarganya menetap di Jalan Arus, Cawang, Jakarta Timur.

Yang akan dijadikan bidikan utama kasus-kasus korupsi berskala besar. Ada kemungkinan Rahman mengancam para koruptor kakap dengan tuntutan hukuman mati. Tentu Rahman tidak main-main untuk hal yang satu ini, sebagaimana dia telah menerima pesan dari presiden untuk bekerja keras dan konsisten menggenggam hukum di tangannya. Dia menerima dukungan penuh dari sang presiden, siapa pun yang bakal menjadi tersangka. Secara pribadi, dia dan keluarganya dikawal oleh delapan petugas keamanan kejaksaan.

Di pundak Rahman terbeban tugas berat. Rahman selalu dibayangi pesan presiden bahwa dunia penegakan hukum di Indonesia saat ini sangat suram. Rahman sependapat dengan presiden dalam soal korupsi, harus ada tindakan tegas dan konsistensi.

"Aturannya sudah ada, hanya selama ini belum dijalankan secara benar. Selama ini hanya terpidana Narkoba yang dikenakan hukuman mati. Itu pun tersendat-sendat," katanya.

Namun Rahman tidak ingin gegabah di dalam menangani kasus korupsi, karena berkaitan dengan banyak hal. Mesti dilihat kasus per kasus. Soalnya, pemberantasan korupsi tidak hanya berada di tangan kejaksaan, tetapi juga kepolisian. Semua ada aturan mainnya, yang paling pokok tegakkan hukum secara profesional tanpa pandang bulu.

Menteri Negara Sekretaris Kabinet

Sudi Silalahi



Terapi Kejutan Kasus Hukum

Agaknya jabatan sekretaris merupakan spesialisasi Letnan Jenderal pensiunan Sudi Silalahi. Tatkala Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Menko Polkam (Menteri Koordinator Politik dan Keamanan), Sudi duduk sebagai Sekretaris Menko. Sekarang dia dipercaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Sekretaris Kabinet.

Pria kelahiran Pematang Siantar, 13 Juli 1949, lebih banyak berkecimpung di jajaran militer. Dia tamatan Akabri tahun 1972. Karir puncaknya di militer adalah menjadi Pangdam Kodam V Brawijaya, Jawa Timur.

Pemerintahan SBY, kata Sudi, pemerintah akan melakukan terapi kejutan, terutama untuk kasus-kasus hukum, untuk 100 hari pertama. Presiden SBY telah meletakkan dasar dan langkah awal yang dapat dijadikan terapi kejutan. Kalau begitu tunggu saja.

Sudi menjelaskan, program kerja 100 hari pertama bertujuan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Prioritas utama kasus-kasus hukum yang mendapat perhatian besar dari masyarakat.

Namun, terapi kejutan itu tetap memperhatikan kaidah hukum, azas praduga tak bersalah dan azas hukum universal lainnya.

Dia adalah kepercayaan SBY. Lulusan Akabri tahun 1972, ini menjabat Pangdam V Brawijaya, Surabaya pada 1999. Sebelumnya, dia menjabat Askomsos Kaster ABRI sejak Oktober 1998, Kepala Staf Kodam Jaya tahun 1998 dan Wakil Assospol Kasospol ABRI pada tahun 1996-1997. □ e-ti/tim-sh/foto-foto:KIB-B

Selamat atas terpilih dan dilantikannya:



**Bapak DR. Susilo Bambang
Yudhoyono, MA**

Sebagai
Presiden RI



**Bapak Drs. Muhammad
Jusuf Kalla**

Sebagai
Wakil Presiden RI

Periode 2004-2009

Beserta Seluruh Kabinet Indonesia Bersatu

*Semoga Sukses Memimpin Indonesia
Lebih Aman, Adil dan Sejahtera*

Dari:

PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Ketua Umum

IR. RAUF PURNAMA



Sekretaris Jenderal

IR. ARUDJI PUDRI

Tempat Anda Membeli

MAJALAH BIOGRAFI TokohIndonesia

MAJALAH BERBASIS ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA
url: www.tokohindonesia.com - www.e-ti.com
PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Distributor Toko Buku:

■ PT. CENTRAL KUMALA SAKTI

Komplek Green Ville Blok BG No.67
Jakarta Telp. (021) 5640185, 5658088

TB. GRAMEDIA

- Taman Anggrek Mall ■ Citraland Mall
- Pondok Indah Mall ■ Mega Mall, Pluit
- Hero Gatot Subroto ■ Melawai
- Matraman ■ Kelapa Gading Mall
- Cempaka Mas ■ Pintu Air
- Gajah Mada ■ Cinere Mall ■ Metropolitan Mall, Bekasi ■ Bintaro Plaza ■ Mahkota Mas, Tangerang ■ Karawachi Mall, Tangerang ■ Daan Mogot Mall, Tangerang

TB. GUNUNG AGUNG

- Taman Anggrek Mall ■ Pondok Gede
- Blok M Plaza ■ Kwitang 6 ■ Kwitang 38
- Blok M Plaza ■ Kramat Jati Indah
- Atrium Plaza ■ Tambun ■ Jl. Ir. Juanda, Bekasi ■ Arion Plaza ■ Depok Plaza
- Citraland Mall ■ Sunter Mall ■ Hero Tendea ■ Trisakti

OFFICE

- Ambassador Mall ■ Ranch Market, Kb. Jeruk ■ Cimone

TB. GUNUNG MULIA

- Jalan Kwitang

Distributor Agen:

■ KEDARTON AGENCY

Stasiun Senen, Jakarta Telp. 021-9119176

AGEN UTAMA

- KPA, Terminal Senen, Tlp.42877451
- MARLIN, Stasiun KA Senen, 08129956840
- HARIAN JAYA, Cawang, 08128309471
- ANTO'S, Kalimalang, 08129256715
- DAVID OXTO, Stasiun KA Senen, 9119180
- PURBA ST, Stasiun KA Senen, 0816974343
- TAMORA, Stasiun KA Senen, 9119175
- ARITONANG, Budi Utomo, 9220669
- RAELMAN, Budi Utomo, 9238167
- SIHITE, Budi Utomo, 9214526 ■ PURBA K, Kuningan, 5264955 ■ NAIBAHO, Cawang, 8577453
- SIMATUPANG, Cillilitan, 80880572
- SIMALUNGUN, Kramat, 88980567
- MILU, Blok M, 7200669 ■ BERLIAN, Pramuka
- KA GROUP, Bekasi, 08129825236
- MANULLANG, Cimone, 08129590050
- YULIANI, Medan, 061-4157471
- MEDY, Surabaya, 031-83205231
- BIRO JABAR, Bandung, 022-4240689

Atau Hubungi

BAGIAN SIRKULASI

E-mail: sirkulasi@tokohindonesia.com

021-83701736 - 9101871

the experience site

THE EXCELLENT BIOGRAPHY JANGAN BELI KUCING DALAM KARUNG

**KENALI TOKOH
SEBELUM DIPILIH**

e-ti.com
TokohIndonesia.com
TokohNasional.com
ensiklopedi.com



ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

PENGALAMAN GURU TERBAIK

SITUS GUDANG PENGALAMAN

dibangun menjadi

ENSIKLOPEDI TOKOH INDONESIA

Tempat Anda menggali dan membagi pengalaman dengan mudah dan efektif, tanpa batas jarak, ruang dan waktu.

www.tokohindonesia.com

www.ensiklopedi.com

www.e-ti.com

Dilengkapi

Majalah TokohIndonesia

MAJALAH BIOGRAFI PERTAMA DAN SATU-SATUNYA DI INDONESIA

Redaksi:

E-mail: redaksi@tokohindonesia.com

021-8301736

The Excellent Biography



TokohIndonesia[®]
www.tokohindonesia.com